

Editor: I Nyoman Yoga Segara

Memberdayakan RUMAH IBADAT, Memakmurkan UMAT

Penulis:

Habibi Zaman Riawan Ahmad, H. Fatchan Kamal, A. Fachruddin, M. Ishom, Abdul Jamil, Zaenal Abidin Eko Putro, Mardjuki, Muchtar, Achmad Ubaidillah, Agus Mulyono, Pormadi Simbolon, I Nyoman Yoga Segara, Selamet, Achmad Rosidi



**Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta, 2015**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memberdayakan Rumah Ibadat, Memakmurkan Umat

ISBN : 978-602-8739-39-9

xxxii + 378 hlm; 15 x 21 cm.

Cetakan ke-1 November 2015

Hak cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Penulis: Habibi Zaman Riawan Ahmad, H. Fatchan Kamal, A. Fachruddin, M. Ishom, Abdul Jamil, Zaenal Abidin Eko Putro, Mardjuki, Muchtar, Achmad Ubaidillah, Agus Mulyono, Pormadi Simbolon, I Nyoman Yoga Segara, Selamat, Achmad Rosidi

Editor: I Nyoman Yoga Segara

Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340

Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421

<http://puslitbang1.kemenag.go.id>

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, Puslitbang Kehidupan Keagamaan dapat menerbitkan naskah buku kehidupan keagamaan. Buku “Memberdayakan Rumah Ibadat, Memakmurkan Umat” yang diterbitkan pada 2015 ini adalah hasil penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada 2014.

Buku yang diterbitkan ini adalah kompilasi dari hasil penelitian tentang model-model pemberdayaan rumah ibadat agama-agama di Indonesia. Penelitian tersebut diselenggarakan di tujuh lokasi, yaitu Surabaya (Masjid Al Falah, Masjid Nasional Al Akbar), Banjarmasin (Masjid Sultan Suriansyah, Masjid Jami’ Sungai Jengah, Mesjid Raya Sabial Muhtadin, Mesjid Hasanuddin Madjedie), Medan (HKBP Cinta Damai, HKBP Maranatha), Papua (GKI Maranatha Remu, GKI Immanuel Boswezen), Yogyakarta (Gereja Jetis, Gereja Kumetiran), Denpasar (Pura Desa dan Puseh, Pura Subak) dan Semarang (Vihara Tanah Putih, Vihara Maha Bodhi).

Buku ini sangat kaya dengan data lapangan dan analisis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan besar, baik untuk pengembangan teori sosial, budaya dan keagamaan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan. Selain itu, buku ini dapat menjadi referensi utama bagi praktisi dan akademisi. Dengan demikian, buku ini secara praksis diharapkan menjadi model untuk mengelola rumah ibadat dengan tujuan memakmurkan umat.

Terbitnya buku ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan dan kerjasama semua pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

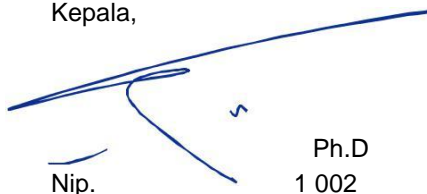
1. Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan dan sambutan untuk buku ini
2. Pakar yang telah bersedia membaca dan memberikan prolog dan epilog

3. Editor yang telah melakukan editing, menyelaraskan, dan menyajikan pengantar untuk memudahkan pembaca menyelami isi buku ini
4. Narasumber, informan, pembantu lapangan dan semua pihak, baik saat penelitian ini dilaksanakan maupun setelah penelitian ini disajikan dalam berbagai forum diskusi ilmiah, sehingga hasil penelitian akhirnya dapat dikompilasi menjadi buku

Namun demikian, terbitnya buku ini juga tidak lepas dari kekurangan, baik secara substansi maupun hal teknis lainnya. Untuk itu, ijinkan kami dengan kerendahan hati mohon maaf sekaligus meminta saran dan kritik agar terbitan berikutnya dapat diperbaiki dan disempurnakan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2015

Kepala,



Nip.

Ph.D
1 002

SAMBUTAN

KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Syukur Alhamdulillah ke hadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, laporan penelitian **Model-Model Pemberdayaan Rumah Ibadat Agama di Indonesia** Tahun 2014 akhirnya dapat dibukukan dengan judul “Memberdayakan Rumah Ibadat, Memakmurkan Umat”. Sampai saat diterbitkan menjadi buku, penelitian ini telah mampu menjawab sejumlah masalah pokok tentang model pemberdayaan rumah ibadat.

Hasil penelitian ini tidak saja penting bagi Badan Litbang dan Diklat, tetapi juga secara umum sangat strategis bagi Kementerian Agama RI dalam mengambil kebijakan terkait pemberdayaan rumah ibadat. Pada sisi yang lain, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar dalam buku ini, penelitian ini merepresentasikan semangat yang sama dalam memberdayakan modal sosial rumah ibadat, meskipun oleh agama-agama dilakukan dengan model yang beragam. Varian model pemberdayaan ini selain karena kearifan lokal di tujuh wilayah (Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin dan Papua), juga terutama aspek teologis agama masing-masing. Namun dalam konsep *pemberdayaan* dan *modal sosial* yang dikaitkan dengan *total quality management*, hasil penelitian ini sangat kaya data dan maknawinya.

Satu hal yang juga sangat berharga adalah penelitian ini telah berhasil mengungkap sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan rumah ibadat selama ini. Meskipun faktor penghambatnya telah diberikan rekomendasi, tetap saja masalah tersebut harus dicarikan jalan keluarnya oleh unit-unit yang berkepentingan pada Kementerian Agama. Harapannya, hasil penelitian ini dapat digunakan sehingga rumah ibadat di masa depan dapat berfungsi lebih maksimal dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kemakmuran umatnya, selain yang utama dan pertama adalah peningkatan kualitas rohani.

Melalui pemberdayaan rumah ibadat dengan berbagai model yang sejak dulu telah dilakukan secara mandiri dan swadaya, Kementerian Agama telah dimudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan kepada umat beragama. Namun upaya peningkatan kualitas taqwa dan iman ini, tidak semata menjadi tugas Kementerian Agama, sehingga sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain menjadi kebutuhan untuk terus ditingkatkan. Semoga dengan dibukukannya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan utama bagi semua pihak.

Sebagai apresiasi atas pencapaian hebat ini, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya khusus diberikan kepada para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Namun demikian, sebagai karya manusia, buku ini mungkin tidak luput dari kesalahan, sehingga diperlukan sumbang saran dan kritik untuk penyempurnaan buku ini di masa-masa yang akan datang. Selamat membaca.

Jakarta, November 2015
Kepala


✓ Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D ✓
✓ NIP. 19600416 198903 1 005 ✓

PROLOG

MAKMURKAN RUMAH IBADAT, MAKMURKAN UMAT

Oleh Imam Addaruqutni

Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Tidak secara spesifik, berbagai macam rumah ibadah: masjid, gereja, vihara, pura, dan sebagainya, lebih dari sekadar konstruksi bangunan *an sich* yang semula secara fungsional merupakan fasilitas ritualistik, pada tataran lanjut dalam spektrum sosiologis dan kultural, praktis merupakan wahana kehidupan sub-kultur dalam suatu masyarakat bahkan negara. Dikatakan sub-kultur oleh karena berbagai rumah ibadah tersebut memang menyemai dan sekaligus merupakan fasilitas bagi proses internalisasi segenap nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut oleh jamaahnya dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Meskipun dalam beberapa aspek malahan boleh jadi dalam banyak aspek terdapat varian perbedaan di antara berbagai rumah ibadah, kiranya hal itu dapat dipahami oleh karena secara herarkis proses penyemaian nilai itu diderivasi dari sumber ajaran agama masing-masing di mana para pemegang otoritas dalam rumah ibadah itu apakah kyai atau ustad di masjid, para rahib dan/atau pendeta di gereja, pada bhiksu dan pedanda masing-masing di vihara dan pura dan sebagainya memegang peran kunci (*key role*) dan sentral yang sekaligus mengkonstruksi semacam corak herarkis dalam perspektif tatanan nilai dan pola sosial. Kondisi demikian jelas berbeda dengan pola umum yang berlangsung dalam masyarakat luar rumah ibadah, yaitu masyarakat dari komunitas jamaah tersebut berasal.

Dengan demikian, berbagai rumah ibadah juga menjelma sebagai pranata sosial (*social institution*) dan juga pranata budaya (*cultural institution*) yang bersifat otonom jika ditimbang dari perspektif (secara teknis) sterilnya dari dominasi kepentingan di luar misi pokok sebagaimana konsep idealnya. Lebih dari itu, bahkan berbagai rumah ibadah tersebut secara sosial dan kultural dalam batas tertentu mampu mengambil peran transformatif sebagaimana dilihat oleh **Emile Durkheim** (*The Elementary Forms of Religious Life*, 1912) ketika secara sosiologis

terutama secara antropologis terbukti bahwa berbagai pengalaman religious menjadi dasar bagi terbinanya suatu tatanan sosial (*social order*) yang khas dalam suatu masyarakat yang dilatarbelakangi oleh spiritualitas keagamaan.

Lebih jauh, bahwa berbagai rumah ibadat tersebut dengan bertemu, berkumpul, dan kemudian bergaulnya jamaah yang sebelumnya merupakan individu-individu dengan latar belakang beragam, kemudian memasuki wilayah kesadaran bersama (*cosmic consciousness*) baik dalam, misalnya, kepentingan dan solidaritas (*social transformation*) yang, jika didekati menurut model analisis intrinsik dari tingkat mikro sampai makro, oleh **Peter M. Blau** (*Exchange and Power in Social Life*, 1964) bahwa gejala saling asosiasi dan saling empati dalam jamaah tersebut melahirkan rasa senang dan bahagia (*mutual awareness*) yang boleh jadi kontras dengan keberadaannya dalam masyarakat luar jamaah, yakni masyarakat dari mana masing-masing individu berasal. Bahkan meski model saling asosiasi dan empati tersebut harus menuntut biaya yang, berbeda dengan model formal transaksi komersial, tidak menghitung untung-rugi atau semacam nilai riil yang akan diperoleh (*capital gain*) atas sejumlah pengorbanan yang dikeluarkannya tetap saja dilakukan dengan ikhlash dan senang hati. Motif kebaikan ekatologis kiranya juga dapat ditimbang sebagai alasan utama kerelaan untuk saling asosiasi dan empati atas sesama jamaah tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana ditawarkan oleh sosiolog Amerika

George C. Homans (*Social Behavior as Exchange*, 1958, termasuk karyanya yang lain *The Human Group, Social Behavior: Its Elementary Forms*, 1961) dengan mempertimbangkan pola tingkah laku yang berlangsung di permukaan (*up-stream level*) di kalangan jamaah, secara fundamental serta-merta berlangsung juga terjadinya semacam pertukaran (nilai) sosial di level bawah (*down stream*) antara yang bersifat *profane* dan yang *sublime*, antara yang artifisial dan yang substansial, dan seterusnya termasuk antara yang duniawiah dengan yang ukhrawiyah. Pertukaran (nilai) sosial tersebut berlangsung begitu kompleks, misalnya antara pemimpin jamaah dengan jamaah, antar-individu dalam jamaah, antara nilai-nilai yang semula dianut dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang datang dari mimbar dan sebagainya.

Sementara itu, telaah **Max Weber** (*Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen*, 1915) khususnya menyangkut etika ekonomi keagamaan

yang nampaknya ingin menjustifikasi bahwa agama apapun pada aspek psikologis justru mengambil peran penting dalam memicu meningkatnya sikap pandang praktis dan pragmatis bagi pemeluknya. Karena itu, sejalan dengan **Homans**, bagi Weber, etika (ekonomi) keagamaanlah, jika dirunut, yang akan secara efektif membangkitkan kinerja profesional ekonomis dalam dunia modern sebagaimana sekarang ini. Secara khusus pandangan teoritisnya yang tertuang dalam publikasinya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (edisi Jerman: *Die Protestantische Ethik und Der Geist Des Kapitalismus*) sebagaimana dimuat dalam *Archiv fur Social wissenschaft und Socialpolitik*, 1905, menelaah ajaran etika Protestan pada umumnya dan khususnya Protestan aliran Calvinis yang didasarkan atas data statistika bahwa di Eropa modern (sekitar akhir abad 19 awal abad 20) di mana para pejabat, birokrat, kaum kapitalis sampai para pekerjanya pada umumnya terdiri dari pemeluk Kristen Protestan. Berbeda dengan kapitalisme klasik yang rakus dengan semangat mendapat keuntungan tanpa batas dan tidak bermoral, Weber menekankan bahwa kapitalisme modern yang disemangati oleh etika Protestan justru mementingkan profesionalisme serta disiplin yang ketat bahwa bekerja dan kerja keras merupakan tugas hidup sebagai ibadah.

Sementara itu, sebagaimana dalam Protestan, Islam juga menekankan pentingnya memperhatikan keseimbangan (*tawazzun*) atau keberimbangan proporsional (*tanasub*) antara semangat mencari keduniaan dan mencita-citakan kebahagiaan di akherat (al-Qur'an; al-Qashash/28: 77) yang diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

“Siapa pun yang menghendaki keduniaan hendaknya dengan menguasai ilmunya, siapa pun yang menghendaki akheratnya hendaknya juga dengan menguasai ilmunya, dan siapapun yang menghendaki keberhasilan keduanya juga harus dengan ilmu”.

Demikian juga doktrin kebaikan (*al-ihsan*) dalam Islam yang terkenal:

“Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, serta berbuatlah untuk akheratmu (ibadah) seakan kamu merasa akan mati esuk hari” (I'mal li duniyaka ka-annaka ta'isyu abadan wa'mal li-akhiratika ka-annaka tamutu ghadan).”

Karena itu, dalam Islam kemalasan sangat dikecam. Demikian juga kemiskinan karena malas adalah keburukan dan sangat dikecam. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan bahwa tangan yang di atas jauh lebih bagus dari tangan yang di bawah. Pemberi lebih terhormat dari yang menerima. Semangat karitatif adalah di anantara orisinalitas etika sosial Islam di mana yang kaya memungkinkan meringankan beban si miskin. Di atas semua itu adalah bahwa ethos kehidupan yang produktif dalam arti seluas-luasnya ini merupakan ethos universal Islam. Demikian juga tentang spirit bahwa hidup itu berarti memberi manfaat bagi sesama terdapat dalam ajaran berbagai agama yang dalam Islam hal ini sangat ditegaskan *Khairukum anfa'ukum li al-nas* (Sabda Nabi Muhammad SAW).

Dalam konteks masjid, secara historis sosiologis masjid pada jaman Nabi Muhammad pun, bahkan terutama Masjid Nabi sendiri di Madinah pada era beliau, telah menjadi semacam epicentrum bagi transformasi sosial seluas-luasnya. Di samping sebagai tempat shalat, masjid menjalankan peran multi-fungsi sehingga masalah sosial politik dan budaya juga dapat dibahas dalam masjid ini. Misalnya, mengatasi krisis perdamaian antar-suku dan strategi perang serta negosiasi (politik), masalah pertanian dan perdagangan (ekonomi), kebersihan dan penampilan di tengah umum (*public performance*) serta pemberantasan buta huruf (budaya), dan sebagainya banyak dibahas dalam Masjid Nabi. Itulah sebabnya hadits-hadits Nabi Muhammad meliputi berbagai hal kehidupan yang terbanyak justru merespon permasalahan umat. Konstruksinya semacam umat bertanya Nabi menjawab. Karena itu kian hari Masjid Nabi semakin dipenuhi jamaah sehingga muncul semacam pemikiran perlu membuat *cluster* jamaah yang diakomodasi lewat semacam berbagai pemondokan (*saqifah-saqifah*) yang dibangun di sekitar Masjid Nabi oleh para sahabat yang kaya dan selanjutnya diwaqafkan ke Masjid. Karena itu seperti *saqifah Bani Sa'adah* (bidang politik) memang tempat berkumpulnya kelompok elite umat yang intens dengan persoalan pemerintahan/kenegaraan, *saqifah Abdurrahman bin Auf* (bidang ekonomi) tempat berkumpulnya kelompok profesional serta mereka yang minat menekuni wilayah ini, dan *saqifah Labid al-Anshariy* untuk pembarantasan buta huruf (bidang budaya) dan pendidikan/pengajaran (*tarbiyah/ta'lim*) untuk menyebut beberapa contoh. Sampai sekarang, fenomena kedekatan masjid dengan kehidupan sosial-budaya umat dan

kehidupan bazariy masih kuat terlihat baik di Masjid al-Haram (Makkah) dan Masjid al-Nabi (Madinah).

Dengan menunjuk pada sejumlah pandangan teoritis di atas, kiranya dapat memperkaya kerangka analisis komparatif yang lebih radikal antara perspektif kuantitatif dengan perpektif kualitatif sebagaimana yang kedua ini ditekankan oleh buku ini. Apalagi jika mengingat bahwa berbagai rumah ibadat memang bisa dibedakan secara tajam dengan lembaga-lembaga industri dan bisnis. Kiranya beberapa contoh di atas juga masuk dalam kategori model pemberdayaan dengan mentransendensikan semua *social capital* yang ada dalam spektrum rumah ibadat agama apapun, khususnya masjid.

Buku ***Memberdayakan Rumah Ibadat, Memakmurkan Umat*** yang diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang ada di tangan khalayak pembaca ini, dengan banyak data kualitatif ingin mengurai dengan detail peran pemberdayaan/pemakmuran rumah ibadat berbagai agama di Indonesia melalui telaah model-model pemberdayaannya dengan objek penelitian (kasus) di tujuh wilayah yang dikaitkan dengan *Total Quality Management* (TQM) sebagai alat analisis yang lazim berlaku dalam dunia industri (*business*). Pendekatan analisis TQM ini pada hemat saya memang perlu elaborasi lebih mendalam oleh karena konstruksi teoritis yang terbangun lebih menekankan pada kinerja *profit oriented* di dunia industri di mana hal ini kontras dengan spirit yang melatari kinerja rumah ibadat dengan *social capital* yang ada secara agregat yang umumnya lebih menekankan keikhlasan beramal sebagai di antara paradigma (nilai) sosial yang menyemai di dalamnya.

Ciputat, 20 Oktober 2015

PRAKATA EDITOR

Dalam konteks pembinaan umat beragama, terlebih dalam kehidupan keagamaan yang sangat khas Indonesia, rumah ibadat memiliki peran yang sangat strategis. Bahkan sejak kehadiran agama-agama besar ke nusantara, rumah ibadat telah menjadi episentrum, tempat di mana para pemimpin agama dan umatnya melakukan perjumpaan jasmaniah, dan terutama rohaniah. Pada akhirnya, emanasi nilai-nilai kerohanian lebih banyak ditemukan di rumah ibadat. Akibatnya ada semacam “ketidakrekaan” rumah ibadat disepadankan “seperti” sekolah, kantor, atau balai pertemuan. Rumah ibadat berkenaan dengan yang suci dan sakral. Selalu seperti itu.

Henri Lefebvre (1971) mengartikan ruang sakral dengan istilah *second nature* (alam kedua) di mana kondisi obyektif yang dimaknai secara sosial dan historis sebagai tempat suci. Tidak berlebihan akhirnya, kalangan tradisional, terutama di daerah pedesaan misalnya, akan memperlakukan rumah ibadat sebagai *fetishism of space*. Bagi mereka, rumah ibadat nyaris tidak memiliki peluang untuk aktivitas non ibadat.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, rumah ibadat kini juga menjadi wahana aktivitas non ibadat, namun masih berhubungan erat dengan nilai-nilai keagamaan. Fenomena ini dapat terjadi karena ruang untuk aktivitas keagamaan juga semakin terbatas dilakukan secara bebas. Bagaimanapun, rumah ibadat menyimpan banyak modal sosial yang jika diberdayakan akan berdampak langsung untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan hidup ini melingkupi jasmani dan rohani, keduanya terdapat interrelasi.

Semangat ini dapat dijumpai, misalnya dalam Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) IV di Jakarta yang salah satu keputusannya menyatakan peran dan fungsi masjid selain sebagai pusat ibadat, juga tempat ber-*muamalah*, pemberdayaan dan persatuan umat, meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlaq mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT dalam wilayah NKRI.

Sementara bagi umat Kristiani, gereja tidak hanya dipahami sebatas gereja para imam yang sibuk dengan ritual, melainkan juga gereja

para nabi yang peka terhadap masalah-masalah sosial. Bahkan konteks panggilan gereja kini tercakup dalam tiga agenda pokok gereja di dalam dunia, yaitu menegakkan keadilan, mewujudkan perdamaian, dan memajukan kesejahteraan dalam dan bagi seluruh masyarakat.

Dua contoh di atas memperlihatkan bahwa agama-agama pada umumnya juga memiliki ajaran agar umatnya memberikan sebagian harta yang dimiliki bagi kegiatan ibadat, kegiatan sosial (filantropi) dan kemanusiaan. Dalam setiap agama pula, ibadat tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk kesalihan individu yang tercermin dalam ibadat ritual keseharian, tetapi terkait pula dengan kesalihan sosial. Untuk itu tidak heran jika kini banyak rumah ibadat justru berperan besar sebagai lembaga sosial, menghimpun dana umat, melakukan pengelolaan, dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan. Dengan demikian rumah ibadat memiliki peran tidak hanya sebagai tempat untuk beribadat dan pembinaan keagamaan namun juga sebagai tempat pemberdayaan masyarakat.

Bagaimana dengan agama-agama lainnya? Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat pada 2014 telah melakukan kajian dan penelitian mendalam tentang model pemberdayaan rumah ibadat berbagai agama di Indonesia, dengan fokus untuk mengeksplorasi masalah pokok: bagaimana rumah ibadat dikelola untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat beragama; upaya yang dilakukan pengelola rumah ibadat untuk mengoptimalkan modal sosial yang ada; dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan rumah ibadat.

Penelitian atas tujuan penelitian tersebut didekati melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan *focus group discussion*. Penelitian ini dilakukan di tujuh lokasi, yaitu Surabaya (Masjid Al Falah, Masjid Nasional Al Akbar), Banjarmasin (Masjid Sultan Suriansyah, Masjid Jami Sungai Jengah, Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Masjid Hasanuddin Madjedie), Medan (HKBP Cinta Damai, HKBP Maranatha), Sorong (GKI Maranatha Remu, GKI Immanuel Boswezen), Yogyakarta (Gereja Jetis, Gereja Kumetiran) Denpasar (Pura Desa dan Pura Puseh, Pura Subak Pakel II) dan Semarang (Vihara Tanah Putih, Vihara Maha Bodhi).

Ragam Model Pemberdayaan Rumah Ibadat

Total quality management atau TQM yang telah lama digunakan dalam dunia bisnis, dalam penelitian ini menjadi perspektif besar dan “teman dialog” selama penelitian. Pilihan ini menjadi penting untuk mengelaborasi konsep *pemberdayaan* seperti disampaikan Jim Ife dalam Suharto (1997) (baca juga Payne, 1997; Saraswati, 1997) dan konsep *modal sosial* sebagaimana dijelaskan ahli-ahli ilmu sosial, seperti Hanifan (1916), lalu berturut-turut Coleman (1988), Putnam (1993, 1995, 1999) dan Fukuyama (1995). Pemberdayaan, modal sosial dan TQM menjadi kata kunci dalam analisis penelitian ini (lihat lebih jauh tinjauan pustaka).

Dalam setiap simpulan penelitian ini, paling tidak ada tiga hal pokok yang dapat disaripatkan – selain sebagai representasi konteks waktu dan tempat penelitian, juga hasil diskusi teoritik yang menunjukkan bahwa *Pertama*, rumah ibadat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberdayakan umatnya, karena rumah ibadat tidak semata memiliki fungsi sebagai tempat ritual, namun dapat berfungsi dalam berbagai bidang. Ada ruang sakral dan profan yang dimanfaatkan secara proporsional. Modal sosial yang dimiliki rumah ibadat dapat dikelola dan diberdayakan berdasarkan pemanfaatan atas ruang dalam rumah ibadat. Setiap ruang memiliki kegiatan yang berbeda-beda.

Kedua, model pemberdayaan rumah ibadat berbeda-beda, selain karena norma yang dianut masing-masing agama, juga karena kearifan lokal di mana rumah ibadat itu berada. Bahkan dalam satu wilayah juga memiliki keragaman cara, sebagaimana ditemukan di beberapa lokasi penelitian.

Ketiga, secara umum, terdapat faktor pendorong pemberdayaan rumah ibadat dan umat. Hal ini karena peran atau kontribusi aktif para pemuka agama, majelis agama dan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Hampir semua rumah ibadat telah memiliki kemandirian dalam pengelolaannya, dilakukan secara mandiri atau swadaya bahkan ada yang dikelola dengan pola hierarkhis dan terstruktur.

Tiga simpulan tersebut setidaknya menjadi jawaban awal atas pertanyaan apakah modal sosial yang dimiliki rumah ibadat dan para pengelolanya selama ini telah mampu diberdayakan secara maksimal? Selanjutnya, bagaimana model pemberdayaan modal sosial dan

optimalisasi faktor pendukung sehingga hasil pemberdayaan tersebut mampu memakmurkan umatnya, berikut dapat dibaca dalam ragam model pemberdayaannya.

Model Pemberdayaan Masjid di Kota Surabaya yang disajikan Habibi Zaman Riawan Ahmad dan H. Fatchan Kamal boleh dianggap sebagai model pemberdayaan yang lebih banyak memaksimalkan modal sosial, seperti *trust*, *norms* dan *networking*, modal sosial yang diwilayah lain tidak begitu besar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masjid memiliki peran dalam upayanya melakukan pemberdayaan di masyarakat. Masjid tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ritual semata, namun dapat banyak berbuat dalam berbagai bidang. Kemampuan masjid dalam mengelola sumberdaya manusia di internal mereka, dan kemampuan mengembangkan modal sosial menjadikan sebuah masjid dapat menjalankan fungsinya.

Untuk itu sebagai upaya menjaga fungsi masjid, perlu adanya penajaman mengenai kondisi sumberdaya manusia di dalamnya dengan melihat realitas manajemen yang dilakukan, dan analisis terhadap aset yang dimiliki. Bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia perlu melakukan sebuah proses bimbingan dan dorongan agar hambatan-hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masjid dapat diatasi dengan baik.

Model Pemberdayaan Masjid di Banjarmasin yang disajikan A. Fachruddin dan M. Ishom dianggap sebagai upaya para pengelolanya memberdayakan rumah ibadat dengan cara membangun jejaring (*networking*) dalam memuliakan masjid-masjid bersejarah dan sektoral yang banyak terdapat di provinsi “seribu sungai” tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberdayaan masjid dilakukan melalui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), dan pengawasan bervariasi sesuai tipologinya.

Pada masjid raya dan masjid sektoral mekanismenya lebih menekankan manajemen *top-down*, yang berpangkal kepada penyandang dana utama atau pengurus yayasan yang cukup besar. Yang unik adalah masjid tipe bersejarah, seperti Masjid Sultan Suriansyah dan Masjid Jami Sungai Jengah. Keduanya hanya mendapat bantuan dari pemerintah secara tentatif, dan selebihnya dari bantuan swadaya masyarakat. Pada kedua

masjid ini diterapkan mekanisme *bottom-up* di mana antara pengurus dengan jemaah sama-sama merasakan kepuasan karena masjid yang mereka banggakan masih tetap eksis, sekalipun hanya melayani bidang peribadatan, pendidikan, dan dakwah.

Model Pemberdayaan Gereja HKBP di Medan yang disajikan Abdul Jamil, Zaenal Abidin Eko Putro, dan Mardjuki dapat dikatakan sebagai model pemberdayaan dengan cara membangun *strong leadership* dan kemandirian jemaat. Hal ini dapat dibaca saat peneliti menggambarkan Gereja HKBP, baik Gereja Cinta Damai dan Maranatha yang selama ini rutin melayani jemaat juga aktif dalam melaksanakan kegiatan sosial, seperti memberikan santunan untuk jemaat yang sakit, meninggal, dan kurang mampu. Gereja HKBP merupakan gereja yang memiliki kemandirian, di mana kegiatan gereja dibiayai sepenuhnya oleh jemaat melalui dana persembahan yang dihimpun secara sukarela.

Dana persembahan dari jemaat, dimanfaatkan untuk empat hal, yaitu *pertama* untuk pengelolaan Gereja seperti pembayaran listrik, telephon, PAM, kebersihan, dan biaya hidup pendeta. *Kedua*, untuk pembangunan gereja seperti rehabilitasi gedung. *Ketiga*, untuk disetor ke pusat HKBP. *Keempat*, yaitu dana diakonia untuk kegiatan sosial. Pengelolaan dana tersebut diadministrasikan oleh pengurus secara baik, dan dilaporkan secara berkala kepada jemaat. Di samping itu dilakukan audit oleh auditor internal, auditor KHBP distrik dan HKBP pusat. Memang, usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak gereja terhadap jemaat dan masyarakat nampak belum signifikan, hal ini karena secara finansial gereja masih terbatas, dan masih fokus pada pembangunan gedung, yaitu gedung “Serba Guna” untuk Gereja HKBP Cinta Damai dan gedung gereja untuk HKBP Maranatha.

Model Pemberdayaan GKI di Kota Sorong yang di sajikan Muchtar dan Achmad Ubaidillah adalah model pemberdayaan dengan merefleksikan teologi melalui diakonia transformatif. Model pemberdayaan ini dapat dibaca bahwa GKI Marantha Remu dan Immanuel Bozwesen yang merupakan kelompok Kristen Protestan beraliran Calvinis dengan struktur keorganisasian menganut model Presbyterial Sinodal, serta merupakan denominasi Gereja Kristen Injili di tanah Papua memiliki dan menerapkan model manajemen yang sama baik dalam hal manajemen organisasi maupun manajemen keuangan. Setiap

keputusan terkait dengan perencanaan kegiatan dirumuskan dan diputuskan dalam sidang jemaat sebagai forum tertinggi di aras jemaat yang pelaksanaan sidangnya berdasarkan pada tata gereja, peraturan pokok, peraturan khusus serta peraturan pelaksanaan Gereja Kristen Injili di tanah Papua.

Model pemberdayaan yang dilakukan mengacu pada model teologi diakonia transformatif selain model diakonia yang bersifat karitatif. Sedangkan model manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan adalah model manajemen Kristus dan Model Kepemimpinan Transformasional. Partisipasi aktif jemaat berjalan dengan baik sehingga menentukan keberhasilan program-program yang diselenggarakan oleh gereja maka Pelaksana Harian Majelis Jemaat di GKI Maranatha Remu dan Immanuel Bozwesen Kota Sorong.

Model Pemberdayaan Gereja di Kota Yogyakarta yang disajikan Agus Mulyono dan Pormadi Simbolon adalah model pemberdayaan yang dilakukan dengan cara menegakkan hirarkhi dan meneruskan keteladanan para romo yang sudah banyak berjasa. Para pengurus Gereja Jetis dan Gereja Kumetiran dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat beragama digariskan secara hirarkis mulai dari Uskup (Keuskupan), diturunkan lagi kepada Kevikepan (perwakilan uskup dengan wilayah tertentu), kemudian dilaksanakan dalam paroki oleh pastor paroki beserta jajarannya. Pola ini merupakan kekhasan Katolik, dan pola organisasinya sama untuk Paroki-Paroki. Perbedaannya, berjalan tidaknya organisasi Paroki tergantung kepemimpinan dan kreativitas Pastor Paroki.

Memang pemberdayaan ekonomi umat untuk kedua gereja di atas tidak begitu kelihatan namun model pemberdayaannya dialihkan dengan memfasilitasi pelatihan-pelatihan kepada umat, misalnya berdagang. Ada juga pemberian pinjaman dana dengan keringanan pembayaran cicilan di bulan keempat seperti yang dilakukan di paroki Santo Albertus Jetis Yogyakarta. Pemberdayaan ekonomi umat pada umumnya bersifat karitatif, bantuan bagi umat yang kurang mampu. Umat yang kurang mampu dibantu berupa dana membiayai uang sekolah atau uang sosial bagi yang sakit atau berduka. Model pemberdayaan ini dapat dilangsungkan dengan baik karena disokong oleh kesadaran umat yang

cukup tinggi, terutama persembahan sukarela, juga sumbangan tenaga, dan waktu

Model Pemberdayaan Pura di Kota Denpasar yang disajikan I Nyoman Yoga Segara dan Selamat menjadi model pemberdayaan yang khas dengan adanya konsep “pembagian dunia” atau struktur alam yang dikontekstualisasi melalui ajaran *Rwa Bhineda*, *Tri Mandala* dan *Tri Hita Karana*. Bagaimanapun, pemberdayaan rumah ibadat umat Hindu di Bali, khususnya di Denpasar sangat berkaitan erat dengan klasifikasi pura yang masing-masing klasifikasi pura tersebut memiliki *pengempon* atau komunitas di pura bersangkutan, sehingga pemberdayaan tempat ibadat sangat tergantung pula dari program dan kegiatan yang mereka (baca: *pengempon*), baik yang rutin maupun kegiatan-kegiatan insidental untuk komunitas internalnya.

Berdasarkan pemetaan seperti tersebut, modal sosial yang dimiliki sebuah pura untuk memberdayakan *pengemponnya* akan secara konkrit, dirasakan, dinikmati dan tepat sasaran untuk para *pengemponnya*, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui koperasi, LPD, pasar, dll; kebutuhan seni-budaya melalui sekaa atau kelompok-kelompok sosial yang memberikan kesempatan kepada umat untuk mengekspresikan seni dan budayanya; kebutuhan rohani melalui aktivitas keagamaan. Artinya pemberdayaan pura semata untuk memenuhi kebutuhan manusia akan nilai-nilai ketuhanan yang bersifat rohaniah yang diimplementasikan ke dalam konsep *parahyangan*, kebutuhan manusia secara jasmaniah (*pawongan*) dan kebutuhan untuk hidup dialam semesta atau lingkungan hidup (*palemahan*). Tujuan ini adalah inti dari ajaran *Tri Hita Karana* yang implementasinya secara konkrit juga dilakukan di pura berdasarkan *Tri Mandala*, yaitu *nista mandala* untuk kegiatan manusia secara profan, *madya mandala* masih untuk kegiatan manusia tetapi lebih berorientasi kepada Tuhan dan *utama mandala* total untuk Tuhan. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan *total management quality* telah secara nyata dan langsung dilakukan oleh para *pengempon* secara mandiri dan otonom meskipun berada dalam atap yang sama, yakni manajemen pemerintahan baik melalui *desa pakraman* maupun *desa dinas*. Artinya *Pengempon Pura Kawitan*, *Pura Swagina*, *Pura Kahyangan Tiga* dan *Pura Kahyangan Jagat* tetap berada dalam satu wilayah. Sinergi ini menghasilkan kemampuan untuk

membagi kekuatan kepada para *leader* dari masing-masing komunitas (*pengempon*).

Model Pemberdayaan Vihara di Kota Semarang yang disajikan Achmad Rosidi adalah model pemberdayaan rumah ibadat dengan titik tekan memandirikan vihara melalui yayasan yang kuat, dan menjadikan dunia pendidikan sebagai wahana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Buddhis. Sedangkan pelayanan dibidang keagamaan dilakukan melalui peribadatan mingguan, perayaan hari-hari besar, dan konsulting serta umat dapat menemui para Bikkhu setiap saat di vihara masing-masing.

Manajemen kelembagaan dibidang sosial diselenggarakan oleh yayasan, dan urusan pelayanan keagamaan peran diambil oleh vihara yang dipimpin oleh para Bikkhu. Modal sosial didasarkan pada kepercayaan (*trust*) manajemen yayasan pada figur para Bikkhu. Modal sosial lainnya adalah *trust* dari umat Buddha yang makin menyadari peran yang diambil oleh vihara, juga kharisma para Bikkhu yang memimpin di vihara juga makin besar.

Catatan Akhir

Selain menemukan ragam model pemberdayaan di atas, hasil penelitian ini juga berhasil menggali sejumlah hambatan yang dihadapi para pengelola atau pengurus rumah ibadat (lihat faktor penghambat dan pendukung masing-masing penelitian). Beberapa wilayah penelitian masih menghadapi hambatan untuk memaksimalkan modal sosial rumah ibadat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan *pertama*, sinergitas dan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan instansi lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah dan swasta untuk melakukan pemberdayaan rumah ibadat di bidang sosial ekonomi.

Kedua, Kementerian Agama melakukan pembinaan dan sosialisasi yang intensif kepada pemuka agama masing-masing rumah ibadat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa rumah ibadat dapat juga menjadi sentra pelayanan dan pemberdayaan yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ritual (rohani) semata, tetapi juga kewirausahaan (ekonomi),

pendidikan, sosial-budaya dan kebutuhan profan lainnya tanpa sedikitpun mengurangi kesakralan rumah ibadat.

“Rumah ibadat berdaya, umat beragama makmur”, itulah idealisasi hasil pemberdayaan rumah ibadat yang diharapkan di masa mendatang. Lalu bagaimana caranya, dan apa modelnya? Buku ini akan menjadi pemandu pembaca untuk “berenang” di lautan data dan analisis para peneliti.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat [*]

Jakarta, Agustus 2015

I Nyoman Yoga Segara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG	
KEHIDUPAN KEAGAMAAN	iii
SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT	
KEMENTERIAN AGAMA RI	v
PROLOG	vii
PRAKATA EDITOR	xiii
DAFTAR ISI	xxiii

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
Metode Penelitian.....	5

Tinjauan Pustaka

Definisi Konsep.....	7
Kerangka Teori	10
Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	20

Model Pemberdayaan Masjid di Kota Surabaya:

Memaksimalkan Trust, Norms dan Networking

Habibi Zaman Riawan Ahmad dan H. Fatchan Kamal	23
--	----

Model Pemberdayaan Masjid di Banjarmasin:

Membangun Jejaring untuk Memuliakan Masjid Bersejarah dan Masjid Sektoral

A. Fachruddin dan M. Ishom	73
----------------------------------	----

Model Pemberdayaan Gereja HKBP di Medan: <i>Membangun Strong Leadership dan Kemandirian</i> Abdul Jamil, Zaenal Abidin Eko Putro, dan Mardjuki ..	97
Model Pemberdayaan GKI di Kota Sorong: <i>Merefleksikan Teologi melalui Diakonia Transformatif</i> Muchtart dan Achmad Ubaidillah	121
Model Pemberdayaan Gereja di Kota Yogyakarta: <i>Menegakkan Hirarkhi dan Meneruskan Keteladanan Para Romo</i> Agus Mulyono dan Pormadi Simbolon	155
Model Pemberdayaan Pura di Kota Denpasar: <i>"Membagi Dunia" melalui Rwa Bhineda, Tri Mandala dan Tri Hita Karana</i> I Nyoman Yoga Segara dan Selamat	185
Model Pemberdayaan Vihara di Kota Semarang: <i>Memandirikan Vihara melalui Pendidikan</i> Achmad Rosidi	217
EPILOG	243
INDEKS	245

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rumah ibadat memiliki peran dalam pembinaan umat masing-masing agama, khususnya di bidang keagamaan. Rumah ibadat biasanya dimaknai sebagai ruang sakral, dimana fungsinya sebagai tempat melaksanakan ibadat dan tempat atau ruang suci yang harus terpisahkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Sebagai tempat suci maka rumah ibadat berbeda dengan bangunan atau tempat lain seperti sekolah, balai pertemuan, gedung perkantoran, atau pasar. Henri Lefebvre (1971) mengartikan ruang sakral tersebut dengan istilah *second nature* (alam kedua) di mana kondisi obyektif ruang telah ditransformasikan dan dimaknai secara sosial dan historis sebagai tempat suci. Bagi kaum tradisional rumah ibadat diperlakukan sebagai *fetishism of space* sehingga tidak ada peluang aktivitas non ibadat. Bagi sebagian umat Islam, misalnya masjid berfungsi sebagai tempat shalat saja, itupun bila jamaah shalatnya ramai, tidak ada aktivitas non-shalat atau ibadat *mahdhah* bisa dilakukan oleh masyarakat di masjid.

Namun demikian, di samping berfungsi dalam kegiatan keagamaan rumah ibadat juga berfungsi bagi tempat pelaksanaan aktivitas sosial bagi jamaah atau masyarakat di lingkungan sekitar. Hal demikian tidak lepas dari adanya konsepsi teologis agama-agama yang memberikan tuntunan moralitas kepada manusia untuk mengasihi sesama manusia sehingga agama juga memiliki nilai sosial. Hampir semua agama di samping menekankan kesalihan individu juga kesalihan sosial.

Agama-agama umumnya juga memiliki ajaran agar umatnya memberikan sebagian harta yang dimiliki bagi kegiatan ibadat, kegiatan sosial (filantropi) dan kemanusiaan. Dalam setiap agama, ibadat tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk kesalihan individu yang tercermin dalam ibadat ritual keseharian, tetapi terkait pula dengan kesalihan sosial. Untuk itu tidak heran jika banyak rumah ibadat yang berperan sebagai lembaga sosial, menghimpun dana umat, melakukan pengelolaan, dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan.

Dengan demikian rumah ibadat memiliki peran tidak hanya sebagai tempat untuk beribadat dan pembinaan keagamaan namun juga sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam Islam, yang melalui Mukhtar Dewan Masjid Indonesia (DMI) IV di Jakarta, peran dan fungsi masjid dinyatakan bahwa masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadat dan tempat ber-muamalah. Lebih rinci dijelaskan dalam mukhtar tersebut, peran dan fungsi masjid adalah sebagai pusat ibadat, pemberdayaan dan persatuan ummat, meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlaq mulia, kecerdasan umat, tercapainya masyarakat adil makmur, yang diridhoi Allah SWT dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu bagi umat Kristiani, gereja tidak hanya dipahami hanya sebatas gereja para imam yang sibuk dengan ritual, melainkan juga gereja para nabi yang peka terhadap masalah-masalah sosial. Bahkan konteks panggilan gereja kini tercakup dalam tiga agenda pokok gereja di dalam dunia, yaitu menegakkan keadilan, mewujudkan perdamaian, dan memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Di sinilah nampak adanya persoalan terkait manajemen (baca: pengelolaan) rumah ibadat. Pada satu sisi, ada rumah ibadat yang hanya difungsikan oleh pengelolanya hanya sebatas ruang untuk tempat beribadat atau pembinaan keagamaan, namun sebagian rumah ibadat lainnya, peran rumah ibadat juga telah difungsikan untuk kegiatan sosial, pemberdayaan umat, bahkan pengembangan ekonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010-2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Buku II Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, dijelaskan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Berkaitan dengan kualitas beragama yang belum optimal, dinyatakan bahwa pelayanan kehidupan beragama masih terbatas, untuk itu pemerintah perlu lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya dengan mudah dan aman. Melihat peran rumah ibadat yang begitu penting dan strategis, maka banyak dukungan diberikan terhadap rumah

ibadat baik oleh masing-masing jamaah rumah ibadat dan masyarakat, juga diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.

Kementerian Agama melalui berbagai bentuk program dan kegiatan, salah satunya adalah memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadat dan ormas-ormas keagamaan. Pemberian bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di masyarakat. Bantuan dimaksud bila dilihat dari jumlah nominal tidak banyak menolong dan mengatasi kebutuhan para penerima bantuan. Akan tetapi, dari segi tanggung jawab, perlindungan, pengayoman, dan layanan terhadap kehidupan beragama di Indonesia sangatlah bermakna. Program bantuan Kementerian Agama ini memiliki makna strategis di samping sebagai pengembangan manajemen rumah ibadat dalam mengelola rumah ibadat, juga untuk menunjang peran sosial rumah ibadat dalam pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, mengingat besarnya jumlah rumah ibadat maka bantuan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh rumah ibadat yang ada. Berdasarkan data statistik hasil sensus jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 dan data jumlah rumah ibadat tahun 2011 oleh PIKMAS Kemenag, diketahui bahwa jumlah penduduk dan rumah ibadat,¹ adalah: umat Islam 207.176.162; jumlah masjid 239.497,² umat Kristen 16.528.513; jumlah gereja 60.170, umat Katolik 6.907.873; jumlah gereja 11.021, umat Hindu 4.012.116; jumlah pura 24.837, umat Buddha 1.703.254; jumlah vihara 2.354, dan umat Konghucu 117.091; jumlah kelenteng 552.

Berdasarkan data tersebut, terdapat sejumlah preposisi yang menarik, yaitu *Pertama*, sejumlah bantuan yang diberikan kepada rumah ibadat seringkali tidak proporsional antara kebutuhan riil dengan besar bantuan. Akibatnya, seringkali pembangunan rumah ibadat 'berhenti' di tengah jalan. Atau sebaliknya, beberapa bantuan akhirnya tidak tepat sasaran karena besarnya tidak sesuai dengan kebutuhan pengelola.

¹ Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

² Jumlah ini sudah mengalami perubahan, misalnya jumlah masjid pada 2012 adalah 288.117 (sumber: Bimas Islam dalam Angka 2012).

Kedua, disinyalir penyaluran bantuan rumah ibadat mengalir kepada kelompok-kelompok tertentu yang berasosiasi dengan oknum tertentu pula. *Ketiga*, bantuan rumah ibadat yang biasanya berbentuk uang selalu dikaitkan dengan bantuan untuk pembangunan fisik, sehingga dalam tingkat tertentu justru bantuan tidak berdampak langsung untuk menciptakan kesejahteraan umat. *Keempat*, rumah ibadat memiliki potensi yang besar khususnya terkait modal sosial, namun umumnya belum secara optimal bisa dimanfaatkan dengan baik.

Empat preposisi tersebut masih menjadi permasalahan diberbagai komunitas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) terkait pola manajemen dan perannya dalam pemberdayaan umat beragama, baik di bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, serta untuk melihat sejauhmana efektivitas bantuan yang diberikan Kementerian Agama dan pihak lain terhadap rumah-rumah ibadat. Artinya, meskipun rumah ibadat sebagai salah satu pranata keagamaan menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang agama, sampai saat ini eksistensi pranata tersebut belum sepenuhnya mampu menunjukkan performa seperti yang diharapkan masyarakat. Atas masalah ini, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat berusaha menggali informasi mengenai pemberdayaan rumah ibadat dalam upaya memakmurkan umat diberbagai agama dalam satu kajian mengenai “Model-Model Pemberdayaan Rumah Ibadat Berbagai Agama di Indonesia”.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokoknya melalui pertanyaan penelitian, yaitu (1) bagaimana model pengelolaan rumah ibadat dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat beragama? (2) bagaimana pengurus rumah ibadat dalam mengoptimisasikan modal sosial yang ada? (3) bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan terhadap dana bantuan yang diterima? dan (4) faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat

pengelolaan rumah ibadat dalam pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat?

Empat pertanyaan kunci penelitian tersebut menjadi penuntun untuk menghasilkan tujuan penelitian, yaitu (1) mengetahui model-model pengelolaan rumah ibadat dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat beragama, (2) Mengetahui upaya rumah ibadat dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada, (3) Mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan terhadap dana bantuan yang diterima, dan (4) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan rumah ibadat dalam pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi seluruh unit Eselon I (masing-masing Ditjen Bimas) pada Kementerian Agama RI dalam merumuskan kebijakan pembimbingan dan mendorong pembinaan rumah ibadat di masing-masing agama serta instansi lainnya yang terkait dengan rumah ibadat dalam memberdayakan umat beragama ke arah yang lebih baik dan profesional; referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi akademisi, para pakar dan pemerhati lembaga sosial keagamaan dan rumah ibadat, dan basis bagi penyusunan kebijakan tentang model-model pemberdayaan rumah ibadat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan dan *key person*. Informan dipilih berdasarkan kualitas dan tidak menekankan aspek kuantitas, yaitu informan yang berasal dari pengurus rumah ibadat dari berbagai agama (sesuai unit analisisnya), dan beberapa anggota masyarakat (jamaah rumah ibadat) serta tokoh agama yang memahami persoalan pengelolaan rumah ibadat diwilayahnya. Sebelum penggalan data primer melalui pelaksanaan wawancara dilakukan penggalan data sekunder sebagai bahan/informasi awal terkait rumah ibadat yang diperoleh dari sumber-sumber resmi yang dianggap relevan dengan objek dan tema penelitian.

Lamanya waktu penggalian data di lapangan adalah 15 hari. Adapun lokasi penelitian adalah di 8 provinsi yang disetiap provinsi dilakukan penelitian terhadap dua rumah ibadat dalam satu agama, yaitu rumah ibadat tingkat Kabupate/Kota dan rumah ibadat tingkat desa/kelurahan yang dikelola masyarakat, namun untuk mendapatkan data yang lebih mendalam maka penggalian data hanya difokuskan di dua rumah ibadat saja dalam satu lokasi Kabuapten/kota.

Langkah selanjutnya adalah pemilihan atau reduksi data, pengelompokkan, dan ketegorisasi data, dengan jalan abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Selanjutnya dilakukan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Sebagai tahap akhir sebelum menyusun simpulan, dilakukan interpretasi data dengan cara memaknai, mendiskusikan, membandingkan dan mencocokkan dengan teori yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Konsep

Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan “memampukan” dan ‘memandirikan masyarakat’ (Kartasasmita, 1997:12). Dalam bahasa Inggris, pemberdayaan sepadan dengan “*empowerment*”, yang memiliki arti *empowerment aims to increase the power of disadvantaged* (Jim Ife dalam Suharto, 1997:214), yaitu pemberian atau peningkatan “*power*” atau “kekuasaan” kepada masyarakat lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged*).

Dari pengertian tersebut terdapat dua pengertian kunci, yaitu “kekuasaan” dan “kelompok lemah” (Ife dalam Suharto, 2005:59). Kekuasaan di sini tidak dalam arti kekuasaan politik yang sempit, namun penguasaan atas berbagai hal seperti pilihan-pilihan dan kesempatan hidup, kemampuan membuat keputusan, kemampuan menentukan kebutuhan hidup, kemampuan menjangkau dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat (kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan), kemampuan mengekspresikan gagasan, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal dan informal, serta kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang/jasa, dan lainnya.

Istilah pemberdayaan atau *empowerment*, juga dapat diartikan sebagai pemberkuasaan atau pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Dalam diskursus ini, pemberdayaan memiliki maksud pengembangan masyarakat dengan banyak metode seperti kemandirian, penekanan terhadap partisipasi, penggunaan jaringan kerja, dan pemerataan.³ Lebih lanjut pemberdayaan

³ Gary Craig dan Magorie Mayo, “Editorial Introduction: Managing Conflict through Community Development.” *Community Development Journal*, Vol 2 No 33 (1995: 77-79).

merupakan bagian dari pada pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Tujuan dasar dari pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne, 1997:268). Secara konseptual pemberdayaan harus mencakup enam hal, yaitu: *learning by doing* (belajar dan tindakan konkret), *problem solving* (pemecahan masalah), *self-evolution* (evaluasi secara mandiri), *self-development and coordination* (pengembangan diri dan hubungan luas), *self-selection* (pemilihan langkah secara mandiri), dan *self-decision* (memutuskan secara mandiri) (Saraswati, 1997:79-80).

Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, diperlukan kerjasama dan kebersamaan yang baik dari segenap anggota masyarakat. Konsep modal sosial (*sosial capital*) dalam *mainstream* ilmu sosial pertama kali diusung oleh Hanifan (1916). Konsep tersebut semakin populer oleh Coleman (1988), Putnam (1993, 1995, 1999), Fukuyama (1995) dan ilmuwan sosial lainnya.

Menurut pencetusnya, Lyda Judson Hanifan, modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi mengandung arti kiasan, namun merupakan asset atau modal nyata yang penting dalam kehidupan. Contoh modal sosial menurut Hanifan dapat berupa kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Sedangkan Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat madani (*civil community*). Modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan yang terkordinasi (Putnam, 1993:167).

Sementara Fukuyama (1995) menyebutkan adanya keunggulan modal sosial dibanding modal material atau modal ekonomi, modal sosial justru semakin bertambah apabila semakin dikelola dan dipergunakan dengan baik. Penggunaan modal sosial akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan suatu kegiatan pembangunan secara umum. Fukuyama juga menyatakan, kepercayaan (*trust*) muncul jika di masyarakat itu terdapat nilai (*shared values*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Dengan kepercayaan, orang tidak akan mudah curiga yang sering menjadi penghambat. Di samping itu, jaringan (*networks*) memiliki dampak yang sangat positif dalam usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal (Fukuyama, 1995:125)

Pengertian yang hampir serupa dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, ia mendefinisikan modal sosial adalah keseluruhan sumberdaya baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Sedangkan Halpem (2005) secara eksplisit menyatakan bahwa modal sosial itu meliputi *networks*, norma dan sanksi. Modal sosial antara komunitas yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan (Halpem, 2005:12).

Dari beberapa teori modal sosial yang telah dikemukakan para ahli di atas, dapat diambil pengertian tentang modal sosial yang relevan dengan tujuan penelitian ini yaitu potensi fisik atau material dan spiritual yang dimiliki suatu komunitas rumah ibadat yang apabila dibangun dan ditumbuhkembangkan secara baik merupakan kekuatan yang strategis untuk mengembangkan rumah ibadat sehingga mampu menjalankan perannya di masyarakat secara maksimal.

Dengan memahami modal sosial sebagaimana tersebut di atas, maka dalam pengelolaan rumah ibadat terdapat modal sosial yang potensial. Modal sosial itu muncul dari adanya interaksi antara jamaah dan lingkungan komunitas rumah ibadat. Relasi intim yang terbangun antara jamaah akan melahirkan ikatan emosional sebagai sesama jamaat rumah ibadat.

Besarnya modal sosial yang diperoleh oleh seseorang atau suatu lembaga seperti rumah ibadat, tergantung pada seberapa besar kuantitas maupun kualitas jaringan yang diciptakannya, serta seberapa besar

volume modal ekonomi, budaya dan sosial. Dengan demikian, seperti halnya modal ekonomi, modal sosial juga bisa bersifat produktif dan tidak produktif.

Kerangka Teori

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.⁴ Dilihat dari sejarahnya, kemunculan dan berdirinya rumah ibadat di Indonesia adalah bersamaan dengan muncul dan berkembangnya agama-agama itu sendiri. Rumah ibadat dalam sejarahnya berfungsi tidak hanya sebagai rumah ibadat saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan (pembinaan) keagamaan dan penyebaran masing-masing agama.

Dalam RPJMN Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dinyatakan bahwa negara memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar pada setiap warga negara. Ini berarti negara turut memberikan fasilitas terhadap rumah-rumah ibadat sebagai tempat ibadat dan pembinaan keagamaan masyarakat. Namun demikian karena banyaknya jumlah rumah ibadat yang ada, maka fasilitas, pelayanan, dan bantuan yang diberikan pemerintah bagi rumah-rumah ibadat tidak dapat menjangkau seluruh rumah ibadat yang ada. Akibatnya rumah-rumah ibadat lebih banyak dikelola secara mandiri oleh masyarakat sehingga model pengelolaan rumah ibadat juga menjadi sangat beragam.

Terkait rumah ibadat umat Islam, khususnya masjid, ada beberapa tipologi masjid berdasarkan tipe tingkat kewilayahan dan keaktifan pengurusnya. Berdasarkan tingkat kewilayahan, masjid terbagi menjadi masjid negara (berada di tingkat pemerintahan pusat), masjid nasional (masjid provinsi yang ditetapkan pemerintah menjadi masjid nasional), masjid raya (masjid tingkat provinsi), masjid agung (masjid tingkat kabupaten/kota), masjid besar (masjid tingkat kecamatan), masjid Jami

⁴ Ini adalah definisi yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

(masjid tingkat desa/kelurahan), dan masjid yang ada di lingkungan masyarakat.⁵

Berdasarkan keaktifan pengurus masjid, masjid dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu *pertama*, masjid statis. Para pengurus masjid hanya mengurus jamaah tetap yang setiap shalat fardhu datang ke masjid untuk melaksanakan shalat fardhu. *Kedua*, masjid aktif. Para pengelola masjid selain melakukan sebagai mana pada tipe statis, juga merangkul jamaah yang ada di sekitar masjid. Sifat kepengurusan juga lebih terbuka dibanding masjid pasif, dan *ketiga*, masjid profesional. Para pengelola masjid selain melakukan sebagaimana masjid aktif juga merangkul jamaah yang potensial di luar masjid dan leboh bersikap profesional dalam pengelolaan masjid (Direktorat Urais, Ditjen Bimas Islam, 2007:55-57).

Di samping beberapa tipologi tersebut, terdapat tipologi masjid yang didasarkan atas status pengelolaan, status kepemilikan, status pembiayaan, dan letak geografis. Berdasarkan status pengelolaan masjid terbagi dalam masjid yang dikelola oleh keluarga, masyarakat, yayasan, organisasi, perusahaan/instansi tertentu, dan pemerintah. Berdasarkan status kepemilikan, maka status tanah ada yang bersifat wakaf dan non wakaf. Sedangkan berdasarkan status pembiayaan, maka pembiayaan masjid terbagi dalam dibiayai oleh pribadi atau keluarga tertentu secara mandiri, masyarakat secara bergotong royong, dan masjid yang dibangun dengan dana utama dari pemerintah. Untuk tipologi berdasarkan letak geografis maka masjid terbagi dalam wilayah pedesaan dan perkotaan.

Untuk tipologi rumah ibadat dari agama Katolik, terbagi dalam hirarki sebagai gereja katedral atau gereja keuskupan (wilayah keuskupan), dan gereja paroki, sebuah keuskupan menjadi pusat keagamaan dari beberapa gereja paroki di wilayah teritorial tertentu. Dalam agama Kristen hirarki semacam dalam agama Katolik ada dalam sinode Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), secara hirarki adalah gereja HKBP tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Untuk sinode lainnya maka gereja-gereja itu umumnya memiliki otoritas tersendiri di bawah kepemimpinan pendetanya.

⁵ Direktorat Urais, Ditjen Bimas Islam (2007:53-54)

Tipologi pura juga sama, yaitu pura keluarga (*kawitan, paibon, padharman*) yang dipuja oleh keluarga yang memiliki ikatan daerah, pura berdasarkan wilayah teritorial (*kahyangan tiga*) yang dipuja oleh masyarakat adat pakraman, pura berdasarkan kesamaan profesi (pura Melanting bagi pedagang atau pura Subak bagi petani) dan pura umum yang dipuja oleh umat Hindu tanpa melihat golongan. Secara hirarkhis dimulai dari keluarga, desa pakraman, dan provinsi (*kahyangan jagat*).

Sementara vihara ada yang bersifat hirarkhis, yaitu vihara tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Bagi rumah ibadat agama Buddha, maka rumah ibadat berafiliasi dalam beberapa majelis agama dalam Buddha, seperti Mahayana, Terevada, Budayana, Tantrayana dan lainnya. Namun demikian dalam Buddha, jumlah rumah ibadat yang paling banyak adalah pada Terevada dan Mahayana. Tipologi rumah ibadat ini disamping terbagi berdasarkan segmentasi majelis agama juga terbagi dalam vihara (tempat ibadat utama dan ritual untuk hari-hari tertentu) dan cetya (tempat untuk ibadat para biksu). Adapun untuk rumah ibadat Khonghucu, saat ini jumlahnya masih relatif sedikit dan tersebar dalam wilayah Indonesia, untuk jumlah rumah ibadat terbesar ada di Sumatera Utara dan Bangka Belitung.

Rumah-rumah ibadat umumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk keperluan bersama sebagai bagian integral dari dorongan keyakinan keagamaan. Peningkatan rumah ibadat dari segi kuantitas perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan rumah ibadat dalam menjalankan fungsinya, baik dalam memberikan pelayanan ibadat maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti luas. Untuk itu penting bagaimana menggalang dan menggerakkan modal sosial dan segenap potensi yang dimiliki masjid menjadi kekuatan yang berkembang secara simultan dan timbal balik, rumah ibadat makmur, umat sejahtera. Sebaliknya umat sejahtera rumah ibadat makmur.

Dari uraian di atas, modal sosial memiliki beberapa elemen pokok yang mencakup (1) kepercayaan (*trust*), yaitu meliputi kejujuran, keadilan, sikap egaliter, toleran, keramahan, dan saling menghormati, (2) jaring sosial (*social networks*), yaitu meliputi partisipasi, resiprositas (timbal-balik), solidaritas, dan kerjasama, dan (3) pranata (*institutions*), yaitu meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma, sanksi, serta aturan-aturan. Ketiga elemen tersebut tidak bersifat *given*, untuk itu perlu diciptakan,

dikembangkan, dan didayagunakan melalui mekanisme sosial budaya dalam suatu unit sosial.

Untuk menjawab elemen pokok di atas, ada tiga parameter untuk mengukur apakah rumah ibadat memiliki modal sosial yang kuat atau lemah, yaitu (1) adanya kepercayaan antar sesama jamaah maupun jamaah terhadap pengurus rumah ibadat, (2) sejauhmana jaringan kerjasama antara komunitas sosial keagamaan tertentu dengan rumah ibadat, dan (3) sejauhmana nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam agama diyakini dan dijalankan bersama oleh jamaah rumah ibadat, jika nilai dan norma tersebut secara kolektif dijalankan maka akan dapat berperan dan berfungsi bagi kemajuan rumah ibadat.

Untuk itu penting dilakukan pengelolaan modal sosial secara baik sehingga bisa produktif dan terbangun kuat. Untuk itu rumah ibadat perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu.

Selain dikelola dengan manajemen yang baik, rumah ibadat juga perlu dikelola berdasarkan suatu kepemimpinan yang andal. Kepemimpinan adalah perihal tentang seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan memengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam dinamika kehidupan modern, sebagian rumah ibadat itu sudah dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan modern.

Salah satu teori manajemen yang banyak dikembangkan dalam era modern ini adalah *Total Quality Management* atau TQM yang merupakan suatu usaha dalam proses perbaikan guna mencapai hasil

yang baik, khususnya dalam mutu atau kualitas dari suatu produk. Dalam sejarahnya, TQM lahir di Amerika pada 1980an. Konsep manajemen ini dikalangan Angkatan Laut Amerika disebut *Total Quality Leadership* (TQL). Sedangkan di Jepang disebut *Total Quality Control* (TQC) dan di Singapore disebut *Total Quality Process* (TQP). Sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama Pengendalian Mutu Terpadu (PMT).⁶

Manajemen Mutu Total yang merupakan adaptasi dari TQM mengacu pada metode manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam organisasi bisnis. TQM adalah pendekatan manajemen komprehensif yang bekerja horizontal di seluruh organisasi dengan melibatkan semua departemen dan karyawan, serta memperluas baik ke 'belakang' maupun ke 'depan', termasuk bagi para pemasok dan klien. TQM hanya salah satu dari banyak akronim yang

⁶ Sejarah lahirnya TQM diawali dari Ellias Whitney yang memperkenalkan 'pengendalian mutu' pada awal abad 19 dalam bentuk pengecekan barang yang akan dikirim ke pelanggan dengan cara memisahkan barang cacat untuk kepuasan konsumen. Pendekatan ini dikenal dengan pengendalian mutu klasik. Tahun 1924, Dr. Walter Shewhart memperkenalkan "bagan kendali *control (controlchart)*" yang bermanfaat untuk mengetahui apakah mutu produk yang dihasilkan berada pada batas yang dikehendaki, sehingga inspeksi dilakukan hanya pada sampel barang dan dapat mengurangi biaya. Fungsi pengendalian mutu ini mulai dikembangkan dalam berbagai perusahaan. Pada 1950, Dr.W. Edward Deming memperkenalkan konsep "pengendalian mutu menyeluruh dalam perusahaan". Deming menekankan pentingnya *statistic control* dalam proses produksi dan perbaikan mutu produksi. Deming memberikan kontribusi dengan teori "14 Butir Untuk Manajemen". Deming dan Schewart mengembangkan konsepsiklus "PDCA" (*plan-do-check-action*). "*Plan*" meliputi identifikasi masalah, memperoleh data, dan mengembangkan rekomendasi. "*Do*" meliputi penerapan solusi berbagai percobaan. "*Check*" berupa pengamatan setelah penerapan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai rencana. "*Act*" melibatkan kegiatan perubahan permanen jika hasilnya efektif bagi peningkatan atau kembali pada kondisi sebelumnya jika penerapannya bermasalah. Pada 1961, Dr. AV Feigenbaum memperkenalkan konsep "*make it right at the first time*". Konsep ini akan berkembang dan menjadi salah satu dasar Total Quality Management (TQM). Pada 1979, Phillips B. Crosby menekankan "pentingnya pimpinan puncak" untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman dan meyakinkan bahwa mutu adalah misi pokok yang harus dicapai oleh organisasi. Dan bahwa karyawan di semua tingkatan dapat dimotivasi untuk mengejar peningkatan tetapi motivasi tersebut tidak akan berhasil kecuali disediakan alat untuk meningkatkannya. Pada 1987, lahirlah suatu standar tentang sistem manajemen mutu yaitu ISO 9000, *Quality Management System*.

digunakan untuk menamai sebuah sistem manajemen yang berfokus pada mutu.⁷

TQM menyediakan kerangka-kerangka kerja untuk menerapkan produktivitas yang lebih berkualitas dan inovatif secara efektif yang dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing organisasi. TQM diterapkan bukan hanya pada industri manufaktur, tetapi juga industri jasa. Industri jasa atau non barang ini mulai diterapkan seperti pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain sebagainya. TQM dapat juga dipergunakan oleh lembaga usaha yang berorientasi profit (keuntungan), seperti perusahaan atau lembaga nirlaba (non-profit).

Dari uraian tersebut, prinsip dan unsur pokok dalam TQM dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan sasaran utama yang harus dicapai, karena dalam TQM konsep kualitas suatu produk tidak lagi tergantung kepada kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas sebuah produk itu ditentukan oleh pelanggan.
2. Respek terhadap setiap orang, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu setiap orang dalam perusahaan diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terikat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan.
3. Manajemen berdasarkan fakta, dalam hal ini setiap keputusan selalu didasarkan pada data bukan sekedar pada perasaan.
4. Perbaikan berkesinambungan, untuk mencapai kesuksesan tersebut perlu melakukan proses perbaikan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam proses ini dipakailah siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan hasil dan tindakan korektif terhadap hasil yang sudah diperoleh.

⁷ Akronim lainnya termasuk CQI (*Continuous Quality Improvement*/Peningkatan Putu Berkelanjutan), SQC (*Statistical Quality Control*/Pengendalian Kualitas Statistik), QFD (*Quality Function Deployment*), QIDW (*Quality in Daily Work*/Kualitas dalam Pekerjaan Sehari-Hari), TQC (*Total Quality Control*/Pengendalian Mutu Total), dan lain-lain.

TQM kemudian banyak dikembangkan oleh para ahli manajemen, salah satunya adalah Malcolm Baldrige Quality Award (MBQA). MBQA merupakan “award” yang dimulai sejak 1988, dan ditujukan untuk meningkatkan TQM perusahaan-perusahaan Amerika. Baldrige⁸ pada awalnya menggunakan *Total Quality Management*, seperti “kualitas pelatihan”, “kualitas perencanaan”, “kualitas *team*” dan seterusnya. Namun belajar dari pengalaman, kata “*quality*” akhirnya tidak digunakan lagi dalam menetapkan kriteria, dan sejak 1995 diganti dengan kata “*performance*” yang memberikan tekanan kualitas pada keseimbangan semua aspek organisasi sebagai sebuah sistem, bukan hanya menekankan pada produk atau jasa yang bebas dari cacat, dan pada kepuasan konsumen saja seperti pada TQM.⁹



MBQA digunakan sebagai kerangka kerja (*framework*) untuk mengevaluasi dan mendiagnosis kinerja sistem manajemen organisasi secara keseluruhan. Selain itu, MBQA merupakan *common language* yang memfasilitasi pertukaran informasi antara organisasi di Amerika. MBQA memiliki tujuh kriteria dasar pelaksanaan TQM yang harus dipenuhi dengan baik oleh perusahaan yang ikut kompetisi. Ketujuh kriteria itu

⁸ Malcolm Baldrige adalah Menteri Perdagangan Amerika dari 1981 sampai meninggalnya secara tragis dalam kecelakaan “rodeo” tahun 1987, yang dipandang telah memberikan kontribusi bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi jangka panjang pemerintah.

⁹ Diadaptasi dari Mark Graham Brown: *Baldrige Award Winning Quality, How to Interpret the Baldrige Criteria for Performance Excellence* (New York, CRC Press, 17th Edition, 2008).

setiap tahunnya dikaji ulang sesuai dengan kondisi perindustrian saat itu, sehingga makin lama kriteria-kriteria tersebut makin disempurnakan.

Ketujuh kriteria yang digunakan dalam MBQA terdiri dari:

1. *Leadership*

Kriteria *leadership* ini memeriksa bagaimana pemimpin senior di dalam organisasi membimbing dan mempertahankan kesinambungan organisasi. Bagian ini sekaligus menjalankan bagaimana penataan organisasi dan bagaimana organisasi tersebut memenuhi segala aspek legal dan tanggung jawab etis dari komunitas.

2. *Strategic Planning*

Kriteria ini menjelaskan bagaimana organisasi mengembangkan sasaran strategis dan rencana tindakan mereka serta memaparkan bagaimana kedua hal tersebut dibagikan dan disesuaikan dengan keadaan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kesemuanya itu diukur. Bagian ini terdiri dari dua item, yaitu *strategy development* (bagaimana organisasi mengembangkan strategi dan sasarannya) dan *strategy deployment* (bagaimana organisasi mengubah sasaran strateginya ke dalam rencana tindakan, termasuk di dalamnya bagaimana memproyeksikan kinerja organisasi ke depan).

3. *Customer and Market Focus*

Kriteria ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengerti suara konsumen dan pangsa pasarnya, serta bagaimana menggambarkan suatu hubungan dengan konsumen dan faktor-faktor yang mengarah pada kepuasan, loyalitas serta perluasan bisnis. Bagian ini terdiri dari dua item, yaitu *customer and market knowledge* (bagaimana suatu organisasi menentukan apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan *customer*) dan *customer relationships and satisfaction* (cara suatu organisasi dalam menciptakan hubungan untuk mengetahui kepuasan *customer* dan cara organisasi dalam mempertahankan *customer* yang telah ada).

4. *Measurement, Analysis, and Knowledge Management*

Kriteria ini menjelaskan bagaimana organisasi memilih, menganalisa, dan mengatur serta meningkatkan kapasitas data, informasi serta asset

pengetahuan mereka, dan menjelaskan bagaimana organisasi membahas kinerja mereka. Bagian ini terdiri dari dua item, yaitu *measurement analysis and review of organizational performance* (bagaimana organisasi mengukur, menganalisa, membahas, dan meningkatkan informasi serta data yang dimiliki, sistem pengumpulan informasi dan data, dan keefektifan penggunaannya) dan *information and knowledge management* (bagaimana organisasi memastikan kualitas dan ketersediaan informasi dan data bagi seluruh *stakeholder, supplier, partner* serta rekanan).

5. *Workforce Focus*

Kriteria ini menjelaskan bagaimana sistem kerja, serta pengembangan pendidikan dan *training* pekerja demi meningkatkan potensi mereka hingga maksimal lewat pemerataan seluruh sasaran, strategi, dan rencana tindakan organisasi. Bagian ini sekaligus memeriksa upaya organisasi dalam membangun dan mempertahankan lingkungan kerja serta dukungan terhadap seluruh elemen perusahaan guna menciptakan suasana kondusif terhadap pertumbuhan organisasi dan individu di dalamnya. Bagian ini terdiri dari tiga item, yaitu *work systems* (cara kerja sesuai struktur organisasi dan desain kerja), *human resources learning and training* (pendidikan dan training untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan pekerja), dan *human resources well being and satisfaction* (perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja).

6. *Process Management*

Kriteria ini memeriksa aspek utama dari manajemen proses dalam organisasi, termasuk di dalamnya proses-proses produk dan jasa, proses-proses bisnis, dan proses-proses pendukung.

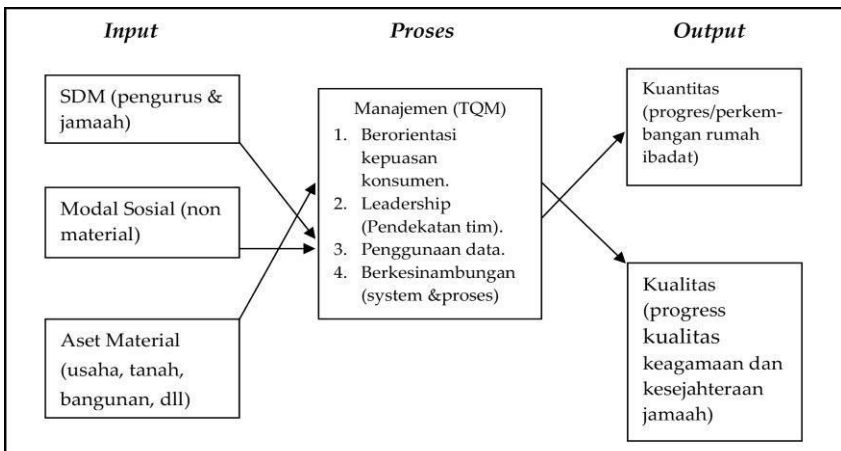
7. *Results*

Dalam kriteria ini seluruh kunci sukses dari kemauan perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya. Bagian ini terdiri dari empat item, yaitu *costumer outcomes* (faktor-faktor yang menyebabkan konsumen merasa puas akan produk atau jasa yang diterima), *market financial outcomes* (kinerja financial perusahaan termasuk pengukuran nilai

ekonomi dan tingkat kenaikan financial serta kinerja dari pangsa pasar), *human resources outcomes* (perbandingan terhadap perusahaan lain meliputi hasil-hasil pengukuran aktivitas dan perbaikan yang dilakukan mengenai sumber daya manusia), dan *special outcomes* (ringkasan hasil-hasil khusus perusahaan yang dibagi dalam kinerja produk dan jasa berkualitas, kinerja kunci proses, produktivitas, *cycle time* dan lainnya).

Dari uraian tersebut di atas, nampak bahwa perkembangan manajemen modern telah sampai pada pendekatan MBQA untuk mengembangkan beberapa perusahaan-perusahaan khususnya di Amerika. Melihat bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah ibadat dari enam agama, yaitu: masjid (Islam), gereja Katolik, gereja HKBP (Protestan), pura (Hindu), vihara (Buddha), dan klenteng (Khonghucu), yang bukan sepenuhnya memiliki unsur-unsur dalam sebuah perusahaan, maka dalam kajian ini digunakan pendekatan TQM yang lebih sederhana dibanding MBQA. Dalam TQM ditekankan adanya empat kaidah jaminan mutu, yaitu (1) Jaminan mutu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, (2) Jaminan mutu mendorong pendekatan tim, (3) Jaminan mutu menggunakan data, dan (4) Jaminan mutu berfokus pada sistem dan proses.

Untuk memudahkan pemahaman terkait kerangka berpikir dalam penelitian ini maka berikut ini *flow chart* yang menggambarkan alur kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut.



Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terkait peran rumah ibadat dalam pemberdayaan umat telah beberapa kali dilakukan, antara lain *Pertama*, penelitian “Pemberdayaan Umat melalui Pengembangan Manajemen Masjid”, Tahun 2008 oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian dilakukan di beberapa masjid, antara lain Masjid Raya Makassar Sulsel, Masjid Ar-Rahman Kampung Melayu Banjarmasin Tengah Kalsel, Masjid Al-Muhajirin Kec. Jelutung Kota Jambi, Masjid Agung dan Masjid Al-Mahmudiyah di Palembang, Masjid Ar-Rahmah Sweta Cakranegara Mataram, Masjid At-Taqwa Kec. Palmerah Jakbar, Masjid Al Bashor Kec. Kramat Jati Jaktim, Masjid Raya Pondok Indah Jaksel, dan Masjid Raya Islamic Center Jakut. Penelitian ini berusaha memotret perkembangan pengelolaan masjid, terutama berkenaan dengan berbagai upaya pemberdayaan umat.

Kedua, penelitian “Bantuan Sosial Kementerian Agama RI bagi rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Indonesia”, Tahun 2010 oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian dilakukan di beberapa daerah, yaitu Aceh, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan NTT. Penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial oleh Kementerian Agama terhadap rumah-rumah ibadat dan ormas keagamaan, dalam penelitian diketahui bahwa secara umum dampak sosial dari bantuan sosial keagamaan tersebut masih kurang nampak, dana bantuan umumnya dimanfaatkan untuk rehabilitasi rumah ibadat.

Ketiga, penelitian “Peran Lembaga Pengelola dan Asset Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Umat Beraga di Berbagai Daerah”, Tahun 2011 oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengelolaan dana dan asset umat yang diberikan kepada sejumlah lembaga sosial termasuk rumah ibadat.

Berbeda dengan tiga penelitian di atas, penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara lebih jelas pola manajemen atau pengelolaan rumah-rumah ibadat dalam melakukan pelayanan keagamaan dan pemberdayaan umat. Sekilas ada persamaan dengan kajian yang pertama, namun perbedaannya adalah penelitian pertama hanya mengkaji rumah ibadat milik umat Islam saja, yaitu masjid,

sedangkan dalam penelitian ini juga akan mengkaji seluruh rumah ibadat umat agama.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang kedua dan ketiga, terdapat beberapa perbedaan yang cukup kuat, yaitu *pertama*, kedua penelitian tersebut hanya mengkaji aspek aspek bantuan dana terhadap rumah ibadat oleh pemerintah, sedangkan aspek manajemen rumah ibadat tidak menjadi fokus kajian. Dalam penelitian kali ini aspek bantuan dana terhadap rumah ibadat oleh pemerintah hanya salah satu bagian dari aspek yang dikaji. *Kedua*, aspek yang dikaji tidak hanya *out come*, yaitu pemberdayaan umat, melainkan juga *input* atau sumber daya yang dimiliki rumah ibadat, juga proses yaitu aspek pengelolaan rumah ibadat oleh masing-masing pengurusnya.

Daftar Pustaka

- Coleman, J.S., *Social Capital In Creation of Human Capital*, American Journal of Sociology, 94 Supplement: S95-120.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. 2007. *Pedoman Pemberdayaan Majid (Melalui Aspek Idarah, Imarah, dan Ri'ayah)*.
- Fukuyama F., 1995. *The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Newyork: Free Press.
- Halpen, David. 2005. *Social Capital*. Cambridge: Polity.
- Putnam, R.D., 1993. *Marking Democracy Work: Civil Tradition In Modern Italy*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Rais, Rahmat. 2009. *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

MODEL PEMBERDAYAAN PURA DI KOTA DENPASAR: “Membagi Dunia” melalui *Rwa Bhineda*, *Tri Mandala* dan *Tri Hita Karana*

Oleh:

I Nyoman Yoga Segara dan Selamat

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Denpasar adalah ibukota Provinsi Bali setingkat kabupaten dan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian dan pendidikan. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Denpasar berada antara 08° 35' 31" - 8° 44' 49" lintang Selatan dan 115° 10' 23" - 115° 16' 27" bujur Timur.⁷¹ Sedangkan berdasarkan letaknya, Kota Denpasar berbatasan langsung dengan kabupaten Badung, kabupaten Gianyar dan Selat Lombok.

Luas wilayah Kota Denpasar adalah 12,78 km² atau 2,18% dari luas Provinsi Bali dengan jumlah penduduk berdasarkan data 2011 sebanyak 804.905 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 413.335 (48,65% dari jumlah penduduk) dan perempuan sebanyak 391.570 jiwa (48,65% dari jumlah penduduk).⁷² Kota Denpasar berada pada lokasi dan aksesibilitas yang baik sebagai faktor penetapan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali.

Dengan posisinya seperti di atas, Denpasar mengemban peran ganda dan multi fungsi, sekaligus memiliki dinamika terhadap keterbukaan, pluralistik dan kompleks sebagai barometer Bali dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini telah berdampak langsung terhadap pertumbuhan kota dengan jumlah dan

⁷¹BPS 2012 dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:2

⁷²*Ibid*

kepadatan penduduk yang signifikan. Secara administratif, pemerintahan kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dan 43 desa/kelurahan.

Hindu adalah agama mayoritas yang dianut penduduk Denpasar. Hampir tiap hari ditemukan perayaan hari suci keagamaan. Hal ini karena dalam agama Hindu dikenal hari-hari suci yang dilaksanakan berdasarkan *wewaran*, *pawukon* dan *sasih*.⁷³ Perayaan hari suci juga dilaksanakan karena *piodalan*⁷⁴ sebuah tempat suci. Pemandangan ini menjadi daya tarik wisata budaya yang dinikmati oleh para wisatawan, baik domestik maupun asing, sehingga sering agama Hindu dan budaya dianggap menyatu dan susah untuk dibedakan.⁷⁵ Semaraknya perayaan hari suci Hindu tidak luput dari amatan para ahli, terutama antropolog,⁷⁶ juga oleh kalangan intelektual dan akademisi.

Denpasar sebagai penggerak denyut nadi ibukota provinsi juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dengan merasuknya modernisasi yang membawa serta perubahan yang berdampak pada dimensi kehidupan alamiah maupun sosial-budaya. Denpasar tampak menjadi kota yang terbuka. Namun satu hal yang menggembirakan, dampak perubahan tidak menggoyahkan kerukunan antaragama yang telah lama terbangun,⁷⁷ dan ini menjadi modal sosial berharga bagi

⁷³ Perayaan hari suci agama dalam Hindu didasarkan atas perhitungan *wewaran*, seperti kajeng kliwon, *pawukon*, seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Tumpek, dll., dan *sasih*, seperti *Nyepi* dan *Siwaratri*

⁷⁴ *Piodalan* sering juga disebut *rerahinan* atau *pujawali* adalah peringatan *tegak ngenteg linggih* sebuah pura. Untuk memahami secara sederhana, dalam bahasa Indonesia, *piodalan* sering dipadankan seperti hari ulang tahun, meski masih tidak sepenuhnya tepat seperti itu.

⁷⁵ Michel Picard menggambarkan suasana keagamaan di Bali seperti ini dalam *Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata* (2006) sebagai atraksi dan karnaval budaya yang tidak pernah mati dalam kehidupan masyarakat Bali. Hal ini sudah sangat lama berlangsung, bahkan sejak kedatangan wisawatan pertama, George Kreus ke Bali dan mempublikasikannya ke dalam Majalah BALI.

⁷⁶ Penelitian tentang Bali dan agama Hindu telah sejak lama dilakukan para orientalis, sebut saja Gregory Bateson; Jean Belo; James A. Boon; M. Covarrubias, dll.

⁷⁷ Selepas publikasi massif tersebut, Bali menjadi sangat terbuka terhadap dunia luar. Kajian ini dijelaskan dengan baik oleh Henk Schulte Nordholt (2010) dalam *Bali Benteng Terbuka 1995-2005*. Menurutnya, keterbukaan seperti ini memiliki ragam dampak hingga hari ini, sekarang sangat tergantung dari bagaimana orang Bali kini menghadapinya.

Denpasar untuk menawarkan rasa aman kepada siapapun yang datang. Untuk mengenal lebih detail tentang Denpasar, dapat dibaca melalui data-data berikut ini.

Tabel 1: Data Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1	2	3	4	5
1	Denpasar Selatan	49,99	222.315	4.447
2	Denpasar Timur	22,31	152.054	6.815
3	Denpasar Barat	24,06	242.622	10.084
4	Denpasar Utara	31,42	187.914	5.981
Jumlah		127,78	804.905	27.327

Sumber: BPS Kota Denpasar (dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:2)

Tabel 2: Data Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Desa		Banjar	
			Dinas/Kelurahan		Dinas	Adat
1	2	3	4	5	6	7
1	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	10	11	105	90
2	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	11	12	87	97
3	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsembian	11	2	112	106
4	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	11	10	102	99
Jumlah			43	35	406	392

Sumber: BPS Kota Denpasar (dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:4)

Tabel 3: Data Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Agama

No	Kecamatan	Hindu	Islam	Kristen	Katolik	Buddha	Konghucu	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Denpasar Selatan	170.725	54.013	10.094	5.692	4.263	64	244.581
2	Denpasar Timur	96.637	31.107	3.371	5.427	1.845	16	138.403
3	Denpasar Barat	143.548	70.455	7.367	3.870	4.165	30	229.435
4	Denpasar Utara	127.256	39.470	4.440	2.260	2.431	43	175.900
Jumlah		538.166	195.045	12.704	25.272	17.249	153	788.589

Sumber: BPS Kota Denpasar (dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:17)

Tabel 4: Data Tempat Peribadatan Umat Beragama di Kota Denpasar

Kec	Hindu					Islam				Kong hucu		Buddha			Katolik				Kristen	
	Kah Ya n gan	Kah yan gan lainny a	Swagi na	Kah yan gan Jagat	Jml	Mas jid	Lang gar	Mo shala	Jml	Klen teng	Jml	Vihar a	Cetya/ TITD	Jml	Kate dral	Gere ja	Ka pel	Jml	Gere ja	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Denpa sar Selatan	33	18	21	-	74	8	-	26	34	-	-	2	-	2	1	2	-	3	21	21
Denpa sar Timur	36	1	24	-	61	4	-	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
Denpa sar Barat	6	16	10	1	32	14	-	41	55	1	-	5	-	5	-	1	1	2	20	20
Denpa sar Utara	30	70	20	-	120	4	-	21	25	-	-	3	-	3	-	-	-	-	15	15
Jml	105	105	75	1	287	30	-	111	141	1	-	10	-	10	1	3	1	5	69	69

Sumber: Profil Kementerian Agama Kota Denpasar (2013:18)

Tabel 5: Data Pemuka dan Tokoh Agama di Kota Denpasar

Kec	Hindu			Buddha					Kris- ten	Konghucu				Islam				Katolik			
	Su lingg ih	Pe mang ku	Jml	Bhik su	Pand ita	Upa sak	Su Ma ner	Jml	Pend eta	Jiao Shen g	Wen Shi	Xue Shi	Jml	Ula ma	Khot ib	Mub a-lig	Jml	Past ur	Brud er	Sust er	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Denpas ar Selatan	54	537	591	2	-	10	-	12	15	1	1	-	2	2	16	9	27	1	-	12	13
Denpas ar Timur	30	318	348	-	-	-	-	-	18	2	1	-	3	3	18	6	27	7	1	3	11
Denpas ar Barat	28	375	403	5	18	20	-	43	26	2	1	-	3	4	42	18	64	1	-	-	1
Denpas ar Utara	29	360	389	-	-	-	-	-	9	4	1	-	8	2	23	10	35	-	-	-	-
Jml	141	1590	1731	7	18	30	-	55	68	9	4	-	16	11	99	43	153	9	1	15	25

Sumber: Profil Kementerian Agama Kota Denpasar (2013:18)

A. Model Pemberdayaan Pura Desa dan Puseh Desa Pakraman

Ubung 1. Profil Pura (*Parahyangan*)

Seperti pada umumnya *desa pakraman* di Kota Denpasar, Desa Pakraman Ubung juga memiliki *Kahyangan Tiga* dan masuk wilayah administrasi Kecamatan Denpasar Barat. *Pura Desa* biasanya terletak di tengah-tengah atau pusat desa, yaitu pura untuk memuja *Dewa Brahma* dengan manifestasi sebagai pencipta; *Pura Puseh* letaknya di hulu atau arah Timur pekarangan desa, tempat suci untuk memuja *Dewa Wisnu* sebagai pemelihara, dan *Pura Dalem* terletak di area kuburan (bhs Bali: *sema, setra*). *Pura Dalem* adalah sthana *Dewa Siwa* dengan fungsi sebagai *pemralina* atau pengembali semua yang ada di alam semesta. *Pura Dalem* biasanya juga berdekatan dengan *Pura Prajapati*, tempat bersthananya *Dewi Durga*, sakti dari *Dewa Siwa*. Dengan demikian, setiap *krama* atau umat di *desa pakraman* memuja *Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa* sebagai *Tri Murti*, yakni tiga manifestasi Tuhan sebagai pencipta-pemelihara-pemralina atau lahir-hidup-mati. Ketiganya menjadi siklus kehidupan umat Hindu. Untuk itulah *Kahyangan Tiga* menjadi tempat suci yang sangat dihormati.

Masalah letak *Kahyangan Tiga* tidak bersifat mutlak seperti di atas, karena tetap harus disesuaikan dengan tipologi *desa pakraman*, juga konsensus bersama yang diselesaikan secara adat, sepanjang disepakati dengan nilai-nilai kebersamaan. Misalnya, jika di *desa pakraman* tersebut tidak memiliki pekarangan yang luas, maka ada kesepakatan tertentu yang dibuat bersama. Falsafah inilah yang membuat *krama desa pakraman* menempatkan

Pura Desa dan *Pura Puseh* menjadi satu *panyengker* (Bhs Ind: tembok pembatas), hanya dibatasi tembok pembatas, dan bahkan memiliki hari suci piodalan⁷⁸ yang sama. *Piodalan Pura Desa* dan *Pura Puseh* adalah *Saniscara Kliwon Wuku Kuningan*. *Kahyangan Tiga* Desa Pakraman Ubung terletak di Banjar Sedana Mertha.

⁷⁸ *Piodalan* sering juga disebut *rerahinan*, yaitu peringatan *tegak ngenteg linggih* sebuah pura. Untuk memahami secara sederhana, dalam bahasa Indonesia, piodalan sering dipadankan seperti hari ulang tahun, meski masih tidak sepenuhnya tepat seperti itu.

Selain *Kahyangan Tiga*, di Desa Pakraman Ubung juga terdapat pura di masing-masing banjar, *pura panti*, *sanggah/pemrajan*, *pura subak*, *pura bedugul* dan *pura melanting*. Berdasarkan data dalam *Ika Ilikita*, di Desa Pakraman Ubung terdapat 37 pura. Pada saat *piodalan*, di *Kahyangan Tiga* selalu dilaksanakan persembahyangan bersama dimulai dengan *Tri Sandhya* dan *kramaning sembah*. Persembahyangan yang sama juga dilakukan pada saat hari-hari suci lainnya, seperti *purnama*, *tilem*, *saraswati*, *siwaratri*, *galungan*, *kuningan*, dll. Sampai saat ini, khusus untuk *Pura Desa* dan *Pura Puseh* belum dapat diuraikan secara jelas asal usul dan sejarahnya, bahkan belum dapat diuraikan dalam *Eka Ilikita*.

2. Umat Pangementon (Pawongan)

Pura Desa dan *Pura Puseh* sebagai bagian dari *Kahyangan Tiga* diempon oleh *krama* Desa Pakraman Ubung yang menurut data dalam *Eka Ilikita* berjumlah 424 kepala keluarga, yang tersebar di masing-masing banjar, yaitu Banjar Sedana Mertha (118); Banjar Tengah (101); Banjar Sari (101); Banjar Batur (50) dan Banjar Merta Gangga (54). *Krama desa pakraman* ini adalah mereka yang sudah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *awig-awig desa pakraman* yang telah dituliskan sejak 29 Januari 1983.

Selain *krama* yang tersebar di banjar, di Desa Pakraman Ubung juga memiliki *Sekeha Teruna* yang juga terdapat di masing-masing banjar. *Sekeha*⁷⁹ yang lain adalah *Sekeha Pesantian*, *Sekeha Gong*, *Sekeha Barong* dan *Sekeha Rurung*. Semua *sekeha* ini sangat aktif dalam membuat denyut agama, adat dan budaya Bali. *Krama* Desa Pakraman Ubung memiliki pekerjaan yang beragam, seperti buruh, dagang, tukang bangunan (biasanya bangunan khas Bali), tukang jahit, PNS dan TNI.

⁷⁹ *Sekeha* atau juga disebut *sekaa* adalah perkumpulan atau organisasi yang terdapat di banjar atau institusi lain, misalnya, perkumpulan pemuda di banjar dikenal dengan *Sekeha Teruna*. *Sekeha* juga merupakan perkumpulan orang-orang memiliki kesamaan minat terutama kesenian, sehingga di Bali banyak ditemukan *Sekeha Gambelan*, *Sekeha Santi*, dll. *Sekeha* juga terbentuk karena kesamaan profesi, misalnya *Sekeha Subak*, *Sekeha Semal*, *Sekeha Manyi*, dll

Kehidupan adat *krama* Desa Pakraman Ubung ditata sedemikian rupa melalui *prajuru-prajuru* yang terdapat mulai dari organisasi terkecil, seperti *kelian maksan*, *kelihan banjar* hingga *kelihan desa* yang biasa disebut *Jero Desa* yang dibantu empat *baga* atau wakil ketua sesuai bidang-bidang yang ditentukan, antara lain Wakil Ketua I (*Petajuh Baga Parahyangan*) yang bertugas dalam urusan persembahyangan dan pura; Wakil Ketua II (*Petajuh Baga Palemahan*) yang bertugas mengurus soal lingkungan dan tata ruang desa; Wakil Ketua III (*Petajuh Baga Pawongan*) yang bertugas mengurus siklus hidup seperti perkawinan, cerai, ngaben, dan upacara lainnya dan Wakil Ketua IV (*Petajuh Baga Badan Usaha Milik Desa/BUMDES*) yang bertugas memutar roda ekonomi dan usaha desa. Selain empat *baga*, *Jero Bendesa* juga dibantu oleh Sekretaris I (*Penyarikan I*), Sekretaris II (*Penyarikan II*) dan Bendahara (*Petengen*).

Kelihan Desa dengan perangkatnya adalah adalah semacam lembaga eksekutif yang dalam menjalankan program dan kegiatannya diawasi oleh semacam lembaga yudikatif, yakni *Kertha Desa*. Sedangkan lembaga yang bertugas menjadi mediator untuk melakukan musyawarah adalah *Sabha Desa* atau semacam legislatif. Seluruh permasalahan yang ada di *desa pakraman* diselenggarakan secara sinergis antarlembaga tersebut. Untuk menunjang dan mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh tugas yang dijalankan, *Kelihan Desa* dibantu oleh selain *krama*, juga *prajuru-prajuru* dimasing-masing banjar serta alat-alat desa untuk memberikan rasa aman *krama*, seperti *pecalang* yang saat ini memiliki aset satu mobil dan empat motor patroli.

3. Kondisi Geografis (*Palemahan*)

Pura Desa dan *Pura Puseh* yang berada di tengah Desa Pakraman Ubung berbatasan langsung dengan Desa Pakraman Pohgading di sebelah Utara, Tukad Badung di sebelah Timur, Desa Pakraman Denpasar di sebelah Selatan dan Tukad Mati di sebelah Barat. Adapun perumahan *krama* dibatasi oleh tembok panyengker, dianjurkan menghadap ke jalan sehingga terlihat asri

serta membuat taman-taman di depan rumah, dan paling penting di sekitar *sanggah* ditanam pohon berbunga.

Adapun total luas Desa Pakraman Ubung adalah 184.878 ha yang terbagi ke dalam pekarangan umah seluas 78.87 ha, tanah tegalan 104.878 ha dan tempat suci seluas 1.13 ha. Untuk membuat kenyamanan krama dilakukan ragam kegiatan seperti membersihkan sampah setiap hari yang di mana masing-masing banjar memberikan dua tenaga tukang sampah, setiap minggu oleh krama banjar, PKK dan *sekeha*. Sedangkan kelestarian taman desa dilaksanakan oleh Sekeha Teruna dari masing-masing banjar.

4. Sumber Dana Pemberdayaan Pura dan Pengelolaannya

Sebagaimana diceritakan oleh Jero Bendesa Desa Pakraman Ubung, I Dewa Putu Mayun (wawancara tanggal 22 Mei 2014), Pemerintah Daerah Bali sangat memperhatikan keberadaan dan ketahanan seluruh Desa Pakraman. Menurut Mayun, hal ini menjadi strategi kebudayaan untuk menjadikan desa pakraman sebagai benteng kokoh untuk menyaring arus kencang globalisasi yang masuk melalui investasi ekonomi seperti pembangunan dan tourisme.

Informasi dari Mayun, yang juga diiyakan oleh Sekretaris I, I Made Jesna, setiap tahun selalu ada dana pembinaan yang diberikan oleh Pemda Bali, karena Pemda sangat berkepentingan untuk memperkuat *desa pakraman*. Jesna mengatakan Bali bisa seperti ini karena keberadaan *desa pakraman* masih mempertahankan tradisi luhur dan mampu berkolaborasi dengan desa dinas sebagai wakil pemerintah. Menurut dua pengurus inti Desa Pakraman ini, bantuan yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat. Tahun lalu mendapatkan bantuan 100 juta dari Pemda Tk I Bali, dan 25 juta dari Pemkot Denpasar.

Namun bantuan-bantuan tersebut oleh para pengurus masih dianggap belum mencukupi kebutuhan riil tiap tahun *desa pakraman* yang bahkan menghabiskan anggaran lebih dari 1 milyar untuk berbagai kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik

(lihat lampiran penggunaan anggaran desa pakraman). Sementara menurut I Wayan Miarsa, seorang umat yang sangat aktif di pura Desa mengatakan bantuan-bantuan tersebut hanya menjadi stimulus bagi krama untuk termotivasi menjalankan seluruh kegiatan Desa Pakraman. Bahkan menurutnya, bantuan yang diterima belum cukup untuk mendanai upacara keagamaan.

Miarsa dan beberapa krama yang hadir dalam *focus group discussion* (FGD) pada 24 Mei 2014, mengharapkan bantuan yang besar datang dari Kementerian Agama untuk aktivitas keagamaan, namun ternyata masih sangat minim, yakni hanya 50 juta dan tahun ini masih belum direalisasikan.⁸⁰ Kondisi ini dibenarkan oleh Ni Ketut Oka Sutriani, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Ia bahkan mengatakan baru kali ini bisa memberikan bantuan kepada Desa Pakraman Ubung. Secara kompak, peserta FGD tetap memberikan apresiasi seraya optimis bantuan tersebut bisa direalisasikan karena seluruh prosedur telah dilalui dengan baik.

Senada dengan peserta FGD, I Dewa Putu Mayun dan I Made Jesna mengatakan bahwa meskipun bantuan dari Pemda dan Kementerian Agama yang diterima masih kecil, Desa Pakraman Ubung telah sejak lama memiliki mekanisme untuk mengatasi masalah ini, namun tetap tidak memberatkan *krama desa pakraman*. Mayun menjelaskan bahwa meski *desa pakraman* tidak memiliki *pelaba* (bhs Ind: aset atau barang berharga, biasanya dalam bentuk tanah) berupa tanah seperti *desa pakraman* lainnya, namun Desa Pakraman Ubung memiliki cukup aset berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yaitu lembaga simpan pinjam *krama desa* dan pasar desa yang keduanya dikelola oleh BUMDES. Setiap tahun, LPD dan pasar mampu memberikan subsidi sebesar 20% dari laba yang diperoleh atau sekitar 600 juta.

⁸⁰ Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari Penyuluh Agama Hindu dan Prajuru Desa Pakraman, dana 50 juta dari Kementerian Agama Kota Denpasar akan digunakan untuk membangun *bataran* (pondasi dasar Pura Desa), namun sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena menunggu hari baik untuk membangun, yang di Bali dikenal *dewasa hayu*.

Sumber dana lain yang digunakan untuk memberdayakan pura dan umat diperoleh dari iuran *krama banjar* yang besarnya tidak dibuat seragam tergantung kemampuan setiap banjar serta bersifat insidental, seperti *piodalan* dan kegiatan lainnya. Secara tegas dapat dikatakan sumber pembiayaan untuk pemberdayaan pura lebih banyak dilakukan secara swadaya. Bahkan para pemuda juga secara kreatif mencari dana untuk kebutuhan mereka dengan mengadakan bazaar pada setiap hari raya, terutama *Galungan* dan *Kuningan*. Biasanya dilakukan di banjar-banjar.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa Pakraman Ubung per 31 Maret 2014, dana masuk ke kas Desa Pakraman mencapai 5.679.286.900, dengan pengeluaran mencapai pada periode tersebut 751.221.300. Saldo yang tersisa dari rekapitulasi ini masih sekitar 4.928.065.600. Jika dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pemerintah, tentu tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan *desa pakraman* yang terbagi ke dalam biaya untuk *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dapat dikatakan, seluruh dana tersebut lebih banyak habis untuk kegiatan non-fisik, seperti *upakara* dan upacara agama.

5. Model Pemberdayaan Pura

a. Pengelolaan Modal-Modal Sosial

Pengelolaan modal sosial yang dimiliki pura sejalan secara koheren dengan program dari *desa pakraman* yang dituangkan sepenuhnya ke dalam *Ika Ilikita*, dan secara linear berkorelasi dengan tujuan agama Hindu melalui *Tri Hita Karana*. Bagaimana Desa Pakraman Ubung mengelola dan memberdayakan modal sosial yang mereka miliki, dapat dilihat dari program yang mereka lakukan selama ini. Seluruh program ini berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan pemberdayaan umat, antara lain:

Bidang *Parhyangan*:

- 1) memberikan bantuan secara rutin tiap *pujawali* kepada *Pura Kahyangan Desa*
- 2) membangun *Bale Pedaunan Pura Desa* dan *Puseh*
- 3) mengadakan persembahyangan bersama saat *Purnama/Tilem, Siwaratri, Saraswati* dan *Pujawali*
- 4) pelaksanaan upacara/*upakara* sebagai prosesi pergantian Tahun Baru Caka dari *melasti, mecaru* dan *Nyepi*
- 5) dharmayatra ke situs-situs atau peninggalan kerajaan Hindu di Jawa Timur

Bidang *Pawongan*:

- 1) melaksanakan Pasraman anak-anak dan remaja
- 2) meningkatkan peran lembaga adat sesuai dengan aturan/kewenangan desa/banjar
- 3) meningkatkan keahlian kaum perempuan dalam membuat upakara/bebantenan dan upacara agama melalui kursus-kursus
- 4) meningkatkan peran serta *krama desa* dalam menghadapi gangguan keamanan (bankamdes)
- 5) sosialisasi tentang rencana nyekah missal tahun 2015
- 6) membantu anggota yang meninggal Rp. 1.000.000.
- 7) mensubsidi biaya sekolah pada anak-anak yang akan masuk di TK/PAUD Widyasanti
- 8) melakukan pendataan *krama desa* sesuai dengan tingkat umur sebagai upaya mengoptimalkan peran *desa pakraman* terhadap perkembangan anggota dalam hal tertib administrasi kependudukan
- 9) mengadakan koordinasi dengan desa dinas (kelurahan) sebagai upaya membangun sinergitas antar lembaga ditingkat desa
- 10) pembinaan bidang seni dan budaya terhadap generasi muda/remaja dengan mengadakan pelatihan bersama antarbanjar se-*desa pakraman*

- 11) merivisi *awig-awig* desa, menyesuaikan dengan keadaan saat ini dan mensosialisasikan pada krama desa

Bidang *Palemahan*:

- 1) menetapkan batas wilayah *desa pakraman*
- 2) menetapkan batas-batas tanah milik desa
- 3) membersihkan/menata *palemahan*/halaman *Pura Desa* dan *Puseh* melalui tamanisasi lingkungan pura
- 4) mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dapat membuat jalur irigasi utama dari hulu sampai ke hilir/pembuangan di sungai Badung untuk mengatasi banjir
- 5) melestarikan sumber-sumber mata air yang ada dilingkungan desa pakraman
- 6) melaksanakan kerja bakti gotong royong kebersihan tiap minggu pertama bagi krama laki-laki dan minggu ketiga bagi krama perempuan
- 7) mengelola sampah secara swadaya
- 8) membuat resapan air (biopori) disetiap keluarga sebagai upaya mengurangi banjir dan menjaga air tanah

b. Manajemen Tri Partit Plus

Seperti telah dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh *desa pakraman* berjalan secara terbuka, transparan dan akuntabel, karena terdapat sinergi tiga kekuatan *desa pakraman*, yakni *Bendesa Adat* (eksekutif), *Kertha Desa* (yudikatif) dan *Sabha Desa* (legislatif). Kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) masing-masing lembaga ini berada di wilayah adat dan agama sehingga dipersatukan oleh nilai-nilai agama sebagai pengikat moral.

Telah sejak lama, *awig-awig* dan *perarem* menjadi garis-garis haluan desa pakraman sekaligus legitimasi agama karena melibatkan hal-hal yang bersifat religius, rohaniah dan *niskala*, salah satunya berlakunya *hukum karma*. Kekuatan lain

yang menyertai lembaga tersebut adalah kebutuhan untuk menjadikan pengabdian yang lebih banyak didasari oleh kebutuhan rohani. Bagi mereka, menjadi prajuru desa pakraman adalah sebuah panggilan yajna.

Selain melalui hubungan yang harmoni antartiga lembaga di atas, di Desa Pakraman Ubung, seperti Desa Pakraman lainnya, berlaku pula pelaksanaan *Catur Guru*,⁸¹ di mana pemerintah, dalam hal ini desa dinas dianggap sebagai *Guru Wisesa* yang wajib diajak bekerja sama dan dimintakan sarannya. Selama ini, Jero Bendesa dan para prajuru lainnya selalu melakukan kerjasama yang baik terutama meminta saran dan pertimbangan dalam mengelola dana bantuan. Hal ini mereka lakukan karena selama ini ada hambatan administrasi dan prosedur.

Seperti diketahui, di Bali, terdapat desa dinas dan desa adat. Keduanya bukanlah bentuk dualisme tetapi justru dualitas yang saling melengkapi sesuai tugas dan fungsinya. Dalam desa dinas, peraturan yang berlaku bersifat nasional, sebagai perbantuan dari pemerintahan di atasnya, yaitu Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Provinsi. Desa dinas dapat menampung penduduk yang bersifat plural karena bersifat nasional. Desa adat mengelola urusan agama, adat dan budaya. Sehingga bagi *desa pakraman*, bantuan dana yang mereka terima, terlebih untuk kepentingan pura harus jauh dari tindakan menyimpang. Bentuk riil dari kerjasama itu adalah LPJ di mana mereka merasa perlu mendapat pendampingan dan bimbingan teknis agar direalisasikan dan dilaporkan benar dan tepat. Sehingga pemberi dan penerima bantuan tidak terkena hukuman *niskala*, karena ini sangat berat.

⁸¹ *Catur Guru* adalah empat guru yang harus dihormati oleh umat Hindu. Keempatnya adalah *guru rupaka* (orang tua), *guru pengajian* (guru, dosen atau mereka yang memberikan ilmu pengetahuan), *guru wisesa* (pemerintah dan perangkat negara lainnya), *guru swadyaya* (Tuhan)

c. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Sumber dana yang diperoleh Desa Pakraman Ubung, baik dari pemerintah selama ini dan terutama swadaya dari *krama*, sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan krama dari berbagai aspek. Sesuai dengan LPJ Desa Pakraman Ubung yang selalu dilaporkan tiap tahun baru caka (bulan April), sumber pembiayaan tersebut digunakan untuk aspek-aspek berikut ini.

- 1) Aspek Sosial-Budaya
 - a) memberikan santunan kepada krama yang meninggal sebesar 1 juta. Selain dari *desa pakraman*, *krama* yang terkena duka meninggal juga diberikan *patis* oleh krama dilingkungan banjarinya senilai harga 1 kg beras dan 5000.
 - b) melakukan pembinaan terhadap sekeha yang ada di desa pakraman, melalui penguatan sekeha-sekeha yang ada di masing-masing banjar, baik yang dilakukan oleh para pemuda melalui Sekeha Teruna maupun para ibu-ibu melalui organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
 - c) melibatkan sekeha dalam setiap kompetisi seni, budaya dan olah raga yang diadakan setiap tahun oleh Pemkot Denpasar, seperti lomba *ogoh-ogoh*, *gong kebyar* dan *utsawa dharma gita*.
 - d) membentuk Gabungan Anak-Anak Gemar Seni Bali (GANGSA) dengan struktur langsung berada di bawah binaan desa pakraman
 - e) melaksanakan Pasraman Kilat pada hari libur sekolah setiap tahun sekali dan membiayai penyelenggaraan PAUD/TK
 - f) memberikan pelatihan *sarati banten* kepada ibu-ibu
- 2) Aspek Agama

- a) melakukan *memukur massal* yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali
 - b) melaksanakan persembahyangan hari-hari suci keagamaan
 - c) melaksanakan *dharmayatra* setiap tahun ke pura maupun tempat-tempat bersejarah
 - d) mengembangkan prasarana pura berdasarkan bantuan tempat ibadah yang diterima
 - e) memberdayakan para pemuda untuk *ngayah* di pura jika ada kegiatan keagamaan melalui *tabuh*
 - f) memberikan peran kepada ibu-ibu untuk *ngayah* sebagai *sarati banten*
 - g) membuat dan atau membeli bahan upacara untuk kepentingan upacara agama
 - h) menjadikan pura, terutama madya mandala sebagai tempat untuk melakukan aktivitas agama saat upacara keagamaan
- 3) Aspek Ekonomi
- a) memberikan gaji kepada para pegawai LPD
 - b) mengelola pasar desa
 - c) memberikan insentif kepada pekerja sampah

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

- 1) Faktor Pendukung
- a) Terdapat sinergi tiga kekuatan *desa pakraman*, yakni *Bendesa Adat* (eksekutif), *Kertha Desa* (yudikatif) dan *Sabha Desa* (legislatif) sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh *desa pakraman* berjalan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Pola ini memperlihatkan adanya kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) masing-masing lembaga dan dipersatukan oleh nilai-nilai agama sebagai pengikat moral.

- b) Telah sejak lama, *awig-awig* dan *perarem* menjadi garis-garis haluan *desa pakraman* sekaligus legitimasi agama karena melibatkan hal-hal yang bersifat religius, rohaniah dan *niskala*, salah satunya dengan meyakini berlakunya *hukum karma*. Keyakinan ini menyertai pemimpin dan pengurus lembaga-lembaga adat dan agama untuk menjadikan pengabdian mereka lebih banyak didasari oleh kebutuhan rohani. Bagi mereka, menjadi *prajuru desa pakraman* adalah sebuah panggilan *yajna*.
- c) Selain melalui hubungan yang harmoni antartiga lembaga di atas, di Desa Pakraman Ubung, seperti *desa pakraman* lainnya, berlaku pula pelaksanaan *Catur Guru*,⁸² di mana pemerintah, dalam hal ini desa dinas dianggap sebagai *Guru Wisesa* yang wajib diajak bekerja sama dan dimintakan sarannya. Selama ini, *Jero Bendesa* dan para *prajuru* lainnya selalu melakukan kerjasama yang baik terutama meminta saran dan pertimbangan dalam mengelola dana bantuan. Hal ini mereka lakukan karena selama ini ada hambatan administrasi dan prosedur. Seperti diketahui, di Bali, terdapat desa dinas dan desa adat. Keduanya bukanlah bentuk dualisme tetapi justru dualitas yang saling melengkapi sesuai tugas dan fungsinya. Dalam desa dinas, peraturan yang berlaku bersifat nasional, sebagai perbantuan dari pemerintahan di atasnya, yaitu kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi. Desa adat mengelola urusan agama, adat dan budaya. Sehingga bagi *desa pakraman*, bantuan dana yang mereka terima, terlebih untuk kepentingan pura harus jauh dari tindakan menyimpang.

⁸² *Catur Guru* adalah empat guru yang harus dihormati oleh umat Hindu. Keempatnya adalah *guru rupaka* (orang tua), *guru pengajian* (guru, dosen atau mereka yang memberikan ilmu pengetahuan), *guru wisesa* (pemerintah dan perangkat negara lainnya), *guru swadyaya* (Tuhan)

2) Faktor Penghambat

- a) Bantuan-bantuan yang diterima selama ini masih dianggap belum mencukupi kebutuhan riil tiap tahun *desa pakraman* karena mereka menghabiskan anggaran lebih dari 1 milyar untuk berbagai kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik.⁸³ Artinya bantuan tidak utuh untuk satu kegiatan atau bangunan yang diajukan. Namun bagi mereka, bantuan-bantuan yang diterima selama ini dianggap sebagai stimulus semata agar *krama* termotivasi menjalankan seluruh kegiatan *desa pakraman*. Bahkan menurutnya, bantuan yang diterima belum cukup untuk mendanai upacara keagamaan.
- b) Meski bukan sebuah hambatan, adanya ketentuan bahwa pura itu suci, para prajuru tidak bisa leluasa untuk memberdayakannya dengan aktivitas di luar keagamaan. Atas dasar ini, pemberdayaan pendidikan yang bersifat sekuler seperti PAUD/TK tidak bisa diselenggarakan di area pura. Berbeda dengan pendidikan ini, pasraman kilat dan malam sastra yang dilaksanakan setiap tahun atau bertepatan dengan hari suci dapat dilaksanakan di area pura karena selain bersifat temporer juga karena bernuansa agama.

⁸³ Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa Pakraman Ubung per 31 Maret 2014, dana masuk ke kas Desa Pakraman mencapai 5.679.286.900, dengan pengeluaran mencapai pada periode tersebut 751.221.300. Saldo yang tersisa dari rekapitulasi ini masih sekitar 4.928.065.600. Jika dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pemerintah, tentu tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan *desa pakraman* yang terbagi ke dalam biaya untuk *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dapat dikatakan, seluruh dana tersebut lebih banyak habis untuk kegiatan non-fisik, seperti *upakara* dan upacara agama.

B. Model Pemberdayaan *Pura Subak Pakel II* Desa Pakraman Ubung Kaja

1. Profil Pura (*Parahyangan*)

Pura Subak Pakel II adalah salah satu *pura swagina* yang pengemponnya berprofesi sebagai petani, terutama petani penggarap di sawah. Pura ini tidak terlalu besar, dan dahulu berada di tengah sawah. Kini karena banyak sawah beralih fungsi menjadi perumahan dan industri, pura ini tampak kecil dan sempit karena berdampingan dengan rumah dan pertokoan. Di depan pura ada sebidang sawah namun terhimpit bangunan di sebelah kanan, kiri dan belakangnya.

Bangunan pura tampak baru dipugar, terutama pada *penyengkemya*. Terlihat batu bata yang menjadi bahan dominan dari *penyengker* cukup kokoh dengan warna merah kehitamannya. Di dalamnya terdapat *bale*, biasanya digunakan untuk pertemuan maupun persembahyangan yang dilaksanakan setiap *Purnama Sasih Kapat*. Di pojok kanan dari candi bentar terdapat *bale kulkul* (bhs Ind: kentongan) yang *kulkulnya* terlihat ringkih karena cukup tua dan termakan jaman. Di bagian hulu terdapat *pelinggih* tempat memuja Dewi atau *Bhatara Sri* sebagai perwujudan Tuhan yang berfungsi memberikan kemakmuran kepada para petani.

Meski terbilang kecil untuk ukuran sebuah *pura subak*, aktivitas *pengempon* dan umat Hindu disekitarnya cukup dinamis, ditambah letaknya yang tepat dipinggir jalan, serta jalanan sempit yang membelah pura dengan bangunan disebaliknya. Dari jauh pura ini terlihat selalu ramai karena kendaraan melambatkan lajunya.

Dengan letaknya yang kini berdekatan dengan rumah-rumah penduduk, mungkin di masa lalu tidak terbayangkan pura ini seperti terjepit. Bahkan pernah suatu ketika pura ini hendak di *pralina* karena jumlah sawah yang makin berkurang dan masyarakat beralih ke sektor lain, terutama industri pariwisata. Bahkan para pemilik tanah atau sawah di desa ini sudah mulai

memberikan peluang bagi pendatang untuk memiliki tanah, dan hal ini menambah semakin terbatasnya jumlah luas sawah yang berarti pula mengurangi pekerja atau penggarap. Padahal kelangsungan pura ini sangat tergantung dari dua hal ini.

2. Umat *Pangempon* (*Pawongan*) dan Kondisi Geografis (*Palemahan*)

Secara kelembagaan, *Pura Subak Pakel II* ini diempon oleh *krama* petani Desa Pakraman Ubung Kaja. *Krama* tersebut berasal dari jumlah pemilik sawah sebanyak 175 orang, petani pemilik (75), petani *penyakap* (50) dan petani pemakai air (125).⁸⁴ Terdapat ketentuan bahwa pemilik sawah belum tentu menjadi *krama subak*, namun *penyakap* atau penggarap wajib ikut menjadi *krama subak*.

Menurut I Nyoman Narta (wawancara tanggal 23 Mei 2014), *pangempon* pura memang adalah para petani, namun jumlah *krama* yang ikut berkontribusi terhadap keberadaan pura ini datang dari *krama* yang bukan bekerja sebagai petani. Bahkan ada di antara mereka yang bukan *krama* Desa Pakraman Ubung Kaja. Hal ini bisa terjadi masyarakat yang membeli dan menjadikan tanah atau sawah sebagai tempat tinggal atau warung dan toko memiliki keyakinan bahwa mereka juga ingin mendapatkan kerahayuan dari *Bhatara Sri* sebagai “pemilik” tanah dan sawah.

Atas keyakinan ini mereka juga ikut berkewajiban secara moral bersama-sama dengan petani lainnya menjadikan *Pura Subak Pakel II* ini sebagai pusat pemujaan dewi kemakmuran. Petani dan yang bukan petani tetapi membeli dan berusaha di atas tanah sama-sama memiliki ketergantungan terhadap *pura subak* ini.

Atas alasan tersebut, pura ini masih tetap bisa berdiri tegak dan menjadi milik bersama secara kolektif. Sehingga ketika ada *pidalan* dan hari-hari suci keagamaan lainnya, pura ini sangat

⁸⁴ Monograf Subak Pakel II, tahun 1999/2000. Namun kini seperti penuturan I Nyoman Narta selaku Kelihan Subak, pemilik sawah tinggal 114 orang

ramai dipuja umat Hindu. Melalui pura ini pula, mereka ingin menjadikannya sebagai media untuk meneruskan ilmu dan mengajarkan kepada anak-anak muda di Desa Pakraman Ubung Kaja untuk juga mencintai profesi petani yang di Kota Denpasar mulai ditinggalkan. Narta menegaskan, mungkin di daerah luar Denpasar, *krama subak* belum terlalu risau karena masih terdapat sawah-sawah yang luas dan penggarap yang juga sangat banyak.

Dengan segala keterbatasannya, para pengurus *subak* masih bersemangat untuk melakukan aktivitas pertanian. Mereka memperkuat diri melalui kepengurusan organisasi *subak* yang dipimpin oleh seorang *Pekaseh* (bhs Ind: pemimpin) dan lima orang *Pangliman* yang bertugas dimasing-masing wilayah dengan dibantu *Kelihan Munduk* serta melalui pengurus *subak* dengan seorang Ketua dibantu Sekretaris, Bendahara dan *prajuru* atau *kesinoman*.

Secara geografis, *Pura Subak Pakel II* terletak di Desa Pakraman Ubung Kaja yang berbatasan dengan Desa Adat Sading disebelah Utara, Tukad Badung Pakel II di sebelah Timur, Banjar Benoh disebelah Selatan dan Tukad Yeh Keling disebelah Barat. Desa Pakraman Ubung Kaja tempat di mana pura ini berada secara topografi bentuk datarannya bergelombang dengan ketinggian lebih kurang 46 m dari permukaan air laut, sedangkan tingkat kesuburan tanahnya sedang. Adapun status kepemilikan tanah terdiri dari sawah hak milik 82.50 ha, sawah *pelaba* pura 2.87 ha dan tidak ada sawah negara yang digarap. Total sawah yang dimiliki atau digarap adalah 85.37 ha.

3. Sumber Dana Pemberdayaan Pura dan Pengelolaannya

Seperti selintas disebutkan di atas, *pura subak* ini sempat hendak di *pralina* karena dirasakan sudah terdesak oleh keterbatasan lahan dan sumber daya manusia. Namun atas keinginan mempertahankan salah satu heritage atau warisan

dunia ini, mereka tetap menjadikan *pura subak* ini sebagai pengikat moral untuk memuja *Bhatara Sri*. Usaha ini tentu terasa berat karena pura ini juga harus terus menerus dipelihara serta mempertahankannya melalui berbagai aktivitas keagamaan, sosial dan budaya.

I Nyoman Narta beserta para anggotanya merasakan beratnya tanggung jawab ini. Apa yang mereka lakukan lebih karena pengabdian kepada leluhur dan Tuhan, dalam hal ini termanifestasi ke dalam sosok *Bhatara Sri*. Sebagai petani, hanya pengabdian ini yang mereka bisa persembahkan, sama halnya persembahan para pedagang kepada *Dewa Rambut Sedana* di *Pura Melanting* atau para nelayan kepada Dewa Baruna di *Pura Segara*. Tentu pengabdian tinggi ini tidak sebanding dengan insentif yang mereka terima setiap bulan sebesar 500 ribu dari Pemda Tk I Bali.

Mengingat *subak* telah menjadi heritage, para pengurus tiap tahun mendapat subsidi dari Pemda Bali yang tiap tahun meningkat jumlahnya, mulai dari 30 juta hingga 55 juta. Bantuan dana ini lebih banyak mereka gunakan untuk upacara keagamaan dan biasanya tidak cukup, karena dalam setahun mereka bisa menghabiskan biaya di atas 100 juta.

Sumber dana untuk membiayai kelangsungan aktivitas subak selain dari pemerintah juga dari iuran tidak wajib. Mereka sadar bahwa hasil pertanian tidak cukup membuat mereka hidup berkecukupan. Sehingga biasanya pula nilai iuran ini bersifat tidak wajib dan sukarela sesuai kemampuan. Mereka menjalankan kewajiban sebagai anggota yang terikat secara *niskala* sehingga bagi para penggarap tidak bisa menolak untuk tidak menjadi *krama subak*.⁸⁵

⁸⁵ Secara terinci, sumber-sumber dana untuk mempertahankan pura Subak dan kelangsungan hidup para pengemponnya berasal dari bantuan insentif dari pemerintah; hasil pungutan dari utpeti itik Rp. 50,-/ekor setiap panen di sawah; sari tahun (penguot) Rp. 50,- per are setiap panen di sawah, urunan dari krama subak dan segala yang bersifat dana (Monograf Subak Pakel II, tahun 1999/2000: 11

Pada 2013 lalu, mereka baru pertama kali mendapat bantuan biaya dari Kementerian Agama Kota Denpasar sebesar 25 juta. Dana ini telah habis mereka gunakan untuk membuat *panyengker* pura yang menelan biaya lebih dari 100 juta, dan bantuan 25 juta sebetulnya hanya bisa mereka gunakan membeli batu bata saja. Selebihnya dari iuran tidak wajib, dana punia dan bantuan Pemda lainnya, terutama Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan.

Menurut Narta, meskipun dana 25 juta terbilang sangat minim, tetapi sudah cukup membantu meringankan beban *krama subak*. Dalam LPJ yang mereka sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, terbaca jelas bagaimana mereka menggunakan dana tersebut dengan baik. Oleh I Ketut Warta selaku Kasi Urusan Agama antara proposal yang diajukan, realisasi dan prosedur administrasi telah dilalui dengan cukup baik oleh Panitia Pembangunan, sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Tabel 6: Uraian Penggunaan Bantuan Pura Subak

Paket II

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bidang Parhyangan Tembok Penyengker Pura Subak				
I	Pembelian Bahan			
	Batu Bata	7000 bh	1.500	10.500.000,-
	Besi ulat	40 mtr	14.000	560.000
	Semen Gresik 40 kg	20 sak	51.000	1.020.000
	Pasir urug	5 colt	200.000	1.000.000
	Ember	2 bh	10.000	20.000
Jumlah				13.100.000
II	Ongkos Tukang			
	Nama Tukang	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	I Wayan Mudita	35 hari	100.000	3.500.000
	I Made Kuryata	35 hari	100.000	3.500.000
	Wayan Juliarta	35 hari	70.000	2.450.000
	Wayan Bagiana	35 hari	70.000	2.450.000
Jumlah				11.900.000
Jumlah Total				25.000.000

Sumber: Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Tahun 2013

Secara administrasi, sebagaimana tertuang dalam LPJ, bantuan tersebut berhasil direalisasikan, dan ketika diperiksa juga tidak ditemukan masalah, namun menurut salah seorang prajuru, terdapat beberapa kesulitan yang cukup berat yang mereka rasakan. Misalnya, kelengkapan SIUP bagi penjual bahan bangunan dan SIUP bagi para tukang. Di Bali syarat ini bagi mereka tidak begitu lazim dimiliki oleh penjual dan tukang bangunan. Hambatan lainnya adalah pencairan dana bantuan sangat berhubungan dengan hari baik atau *dewasa hayu* saat akan memulai pekerjaan. Jika *dewasa hayu* belum ditentukan maka akan berdampak pada pencairan dana, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil pekerjaan.

4. Model Pemberdayaan Pura

a. Pengelolaan Modal-Modal Sosial

Mengingat *Pura Subak Pakel II* adalah *pura swagina* maka pemberdayaannya lebih diarahkan hanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan profesi para *pengemponnya*. Dengan demikian, pura menjadi titik pusat atau sumber kehidupan di mana vibrasi religiusitas sebagai penuntun dalam menjalankan pekerjaan.

Nilai-nilai tersebut mengaliri berbagai kegiatan yang dilakukan para pengemponnya dan menjadi modal untuk mereka mengukuhkan diri sebagai komunitas yang memiliki identitas berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa bidang yang menjadi panduan para *pengempon* pura subak, antara lain bidang agama, pengairan, pertanian, perikanan, peternakan, agrarian, administrasi dan keuangan.⁸⁶

Berdasarkan bidang-bidang tersebut, dituangkan sepenuhnya ke dalam program kerja subak, yaitu:

⁸⁶ *Ibid*, hlm 11-12

- 1) Program Jangka Pendek
 - a) melaksanakan dan memelihara sistim kerta masa dan pola tanam
 - b) mentaati *awig-awig* dan *pasuara subak*
 - c) melaksanakan *aci* (upacara di *Pasubakan*)
 - d) melaksanakan dan memelihara stabilitas dan kelestarian yang meliputi *Parhyangan (Pura Penghulu Subak)*, saluran-saluran air, dan mengatur sistim pengairan semaksimal mungkin
 - e) melaksanakan Panca Usaha Pertanian agar tercapai program peningkatan hasil pangan dan usaha pertanian yang terpadu
 - f) meningkatkan sumber dana/sumber modal subak
- 2) Program Jangka Panjang
 - a) merehabilitasi sarana-sarana pengairan yang rusak
 - b) meningkatkan hasil petani dengan sistem Paket D
 - c) mentaati iuran termasuk pelunasan Ipeda/PBB
 - d) merehabilitasi *Parhyangan Pura Penghulu Subak*
 - e) membuat *bale kulkul*
 - f) membuat *bale timbang*

b. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Berdasarkan wawancara dengan para *prajuru subak*, mereka mengatakan bahwa pemberdayaan *krama subak* dengan menjadikan pura sebagai sumber inspirasi telah membawa mereka pada satu ikatan keluarga yang kuat. Mereka meyakini, dengan profesi petani, *Bhatara Sri* akan selalu hadir untuk memberikan kemakmuran. *Bhatara Sri* dan *pura subak* telah menjadi legitimasi moral dan agama untuk memohon kerahayuan, dan dengan itu semua, terdapat kesadaran kolektif di antara mereka untuk terus

mempertahankan pura dan sawah-sawah karena hampir 90% subak berurusan dengan tanah atau *palemahan*.

Setidaknya ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan, antara lain: *Pertama*, melalui pura, mereka para prajuru itu berusaha terus membina *krama subak* melalui berbagai kegiatan, namun yang paling utama adalah pembinaan pada tingkat *kelihan munduk* karena permasalahan utama dalam pertanian dimulai dari pengaturan air atau irigasi. Dikalangan petani di Bali pada umumnya, tidak jarang masalah air bisa menjadi masalah besar, bahkan konflik antarsubak. *Kelihan munduk* bertanggung jawab terhadap keteraturan pembagian air. Menurut I Nyoman Narta, pembinaan dan penyuluhan yang mereka dapatkan baik dari Dinas Pertanian maupun Dinas Kebudayaan memprioritaskan kelihan munduk untuk mendapatkan bimbingan teknis. Bahkan dalam setahun para *kelihan munduk* mendapat bimbingan teknis 3 kali setahun.

Kedua, melibatkan peran serta *krama subak* untuk mengikuti berbagai lomba seni yang terutama sering dilaksanakan Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan, misalnya *Lomba Lelakut*, *Lomba Sunari*, *Lomba Pindekan*, serta lomba-lomba lain yang berkenaan dengan pertanian yang diadakan dalam rangka ulang tahun Pemda Kota Denpasar.

Ketiga, memberdayakan peran aktif *krama subak* melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapotan) Bina Bhakti Lestari sebagai wadah simpan pinjam dan kebutuhan dasar para petani. Mereka berharap ide ini menjadi embrio koperasi dengan alasan bahwa kesulitan para petani yang semakin besar, juga atas pikiran supaya kelangsungan hidup petani dan anak-anaknya dapat dijamin. Gagasan untuk menjadikan Gapotan sebagai koperasi juga untuk berinvestasi sosial dengan memanfaatkan subsidi dari berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun iuran *krama subak*.

Keempat, menyadari tantangan yang tidak ringan di masa-masa yang akan datang, *krama subak* menjadikan pura

bukan lagi hanya sebagai pengikat *sraddha* dan *bhakti* melalui aktivitas agama, tetapi juga menjadi media untuk menemukan solusi-solusi pertanian melalui pertemuan di *bale*. Dengan demikian pura bagi mereka berfungsi kompleks baik untuk urusan *sekala* (sakral) maupun *niskala* (profan), sehingga kesadaran kolektif di antara mereka terbangun semakin kuat.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung

- a) Adanya kesamaan profesi dapat melahirkan apa yang dalam ilmu antropologi sebut sebagai kesadaran kolektif. Solidaritas ini tumbuh atas berbagai hambatan berupa keengganan anak-anak petani melanjutkan profesi orang tua dan keterbatasan lahan sawah
- b) *Subak* adalah salah satu heritage dan warisan dunia, sehingga para *pengempon Pura Subak Pakel II* merasa dilindungi dan ini terbukti dengan perhatian besar dari Pemda Bali melalui Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan. Khusus untuk Dinas Kebudayaan dalam kegiatan yang bersifat teknis sering melakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama.
- c) Terdapat kesadaran moral, terutama bagi pemilik tanah, rumah dan usaha swasta yang berdiri di atas tanah atau bekas sawah. Menariknya mereka ikut terlibat aktif untuk mempertahankan *Pura Subak Pakel II* dan bahkan ikut berkontribusi. Kesadaran ini diikat dengan sebuah legitimasi agama di mana mereka harus tetap menghormati *Bhatara Sri* sebagai pemilik atau penguasa tanah.

2) Faktor Penghambat

- a) Secara administrasi, menurut para *prajuru*, terdapat beberapa kesulitan yang cukup berat yang mereka

rasakan. Misalnya, kelengkapan SIUP bagi penjual bahan bangunan dan SIUP bagi para tukang. Di Bali syarat ini tidak begitu lazim dimiliki oleh penjual dan tukang bangunan.

- b) Keengganan anak-anak muda untuk meneruskan profesi petani serta keterbatasan lahan sawah menjadi hambatan yang cukup signifikan yang akan menjadi masalah sekaligus tantangan di masa depan.

Penutup

1. Simpulan

- a. Pemberdayaan tempat ibadat umat Hindu di Bali, khususnya di Denpasar sangat berkaitan erat dengan klasifikasi pura berdasarkan ikatan keluarga dari keluarga *batih* (inti) hingga kumpulan keluarga besar, berdasarkan kesamaan profesi, berdasarkan wilayah teritorial dan berdasarkan kesamaan manusia secara universal. Masing-masing klasifikasi pura tersebut memiliki *pengempon* atau komunitas di pura bersangkutan, sehingga pemberdayaan tempat ibadat sangat tergantung pula dari program dan kegiatan yang mereka (baca: *pengempon*), baik yang rutin maupun kegiatan-kegiatan insidental untuk komunitas internalnya. Misalnya, *Pura Kawitan* diberdayakan untuk para keluarga yang memiliki hubungan sedarah; *pura swagina* diberdayakan untuk *pengempon* yang memiliki kesamaan profesi dan fungsi; *Pura Kahyangan Tiga* untuk *pengempon* yang berada diwilayah yang sama secara teritorial, dan *Pura Kahyangan Jagat* untuk semua umat Hindu tanpa memandang perbedaan.
- b. Berdasarkan pemetaan seperti tersebut, modal sosial yang dimiliki sebuah pura untuk memberdayakan *pengemponnya* akan secara konkrit, dirasakan, dinikmati dan tepat sasaran untuk para *pengemponnya*, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui koperasi, LPD, pasar, dll; kebutuhan seni-budaya melalui sekaa atau kelompok-kelompok sosial yang memberikan kesempatan

kepada umat untuk mengekspresikan seni dan budayanya; kebutuhan rohani melalui aktivitas keagamaan. Artinya pemberdayaan pura semata untuk memenuhi kebutuhan manusia akan nilai-nilai ketuhanan yang bersifat rohaniah yang diimplementasikan ke dalam konsep *parahyangan*, kebutuhan manusia secara jasmaniah (*pawongan*) dan kebutuhan untuk hidup dalam semesta atau lingkungan hidup (*palemahan*). Tujuan ini adalah inti dari ajaran *Tri Hita Karana* yang implementasinya secara konkrit juga dilakukan di pura berdasarkan *Tri Mandala*, yaitu *nista mandala* untuk kegiatan manusia secara profan, *madya mandala* masih untuk kegiatan manusia tetapi lebih berorientasi kepada Tuhan dan *utama mandala* total untuk Tuhan.

- c. Berdasarkan dua poin di atas, apa yang dimaksud dengan *total management quality* telah secara nyata dan langsung dilakukan oleh para *pengempon* secara mandiri dan otonom meskipun berada dalam atap yang sama, yakni manajemen pemerintahan baik melalui *desa pakraman* maupun *desa dinas*. Artinya *Pengempon Pura Kawitan, Pura Swagina, Pura Kahyangan Tiga dan Pura Kahyangan Jagat* tetap berada dalam satu wilayah. Sinergi ini menghasilkan kemampuan untuk membagi kekuatan kepada para *leader* dari masing-masing komunitas (*pengempon*). Sebagai contoh, pemberdayaan *Pura Kawitan* akan diserahkan kepada *kelihan maksan* atau *pemaksan*; *pura swagina*, seperti *subak* diserahkan *kelihan subak*; *Pura Kahyangan Tiga* diserahkan kepada *Jero Bendesa* dan *Pura Kahyangan Jagat* oleh Pemda, Kementerian Agama dan majelis umat Hindu. Selain itu, dengan berdasarkan *awig-awig* yang dibuat di masing-masing pura, akuntabilitas dari pemberdayaan umat dan pengelolaan bantuan misalnya, dapat dilakukan secara transparan karena legitimasi agama berupa *awig-awig* menjadi pengikat moral kepercayaan umat. Melalui *awig-awig* pula, para *pengempon* dan pengurus *pengempon* serta para *leadernya* (*kelihan* dan *bendesa*) akan diikat secara spiritual dan *niskala* melalui konsep *karmaphala* yang tidak bisa dilanggar.

2. Rekomendasi

- a. Dalam memberikan bantuan, sebaiknya mengakomodir spesifikasi yang berlaku di daerah tertentu dengan kearifan lokal yang digunakan sebagai falsafah bagi penganutnya. Hal ini karena seringkali terjadi perbedaan yang sangat krusial ketika spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan spesifikasi di daerah. Di Bali, misalnya, barang atau benda yang dipersembahkan ke pura tidak dapat dinilai dengan ukuran uang karena selain mengandung dimensi estetis juga berdimensi religious, yakni sebagai *yajna* atau persembahan suci
- b. Perencanaan bantuan perlu mempertimbangkan kebutuhan riil dari pengguna bantuan, termasuk standar kuantitas nominal sebuah bantuan. Misalnya, perlu dipikirkan bantuan utuh terhadap sebuah bangunan pura, bukan sepotong-sepotong karena akan berdampak pula dalam menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Misalnya, bantuan pembangunan bale kulkul, bale agung, padmasana, dll, bukan bantuan *kulkulnya* saja, atau *balenya* saja.
- c. Perlu standarisasi dari peruntukan dan pertanggung jawaban atas bantuan yang diterima karena masing-masing instansi memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga berdampak pada orientasi para penggunanya. Misalnya, LPJ kepada Pemda Bali relatif lebih mudah dan sederhana dengan LPJ kepada Kementerian Agama. Kendalanya memang karena Kementerian Agama adalah instansi vertical sehingga belum bisa mengadopsi sistem tersebut.
- d. Atas berbagai kendala yang ditemukan, perlu secara terus menerus dilaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis hingga pendampingan kepada pengguna bantuan, sehingga tertib administrasi sampai ke tingkat bawah yang menjadi keinginan pemberi bantuan, khususnya Kementerian Agama dapat melakukan perencanaan yang matang, pengawasan yang maksimal dan evaluasi yang komprehensif, sekaligus membelajarkan umat untuk menjadi masyarakat yang berintegritas sejalan dengan agama yang dianut dan akuntabel dengan menganut prinsip transparansi

Daftar Pustaka

- Nordholt, Henk Schulte. 2010. *Bali Benteng terbuka 1995-2005*. Terjm. Arif B. Prasetyo dari *Bali, an open fortress, 1995-2005. Regional autonomy, electoral democracy and entrenched identities*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. 1993/1994. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu I- XV*.
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Terjm. Jean Couteau dan Warih Wisatsana dari *Bali: Tourism Culturel et culture touristique*, 1992. Jakarta: Forum Jakarta-Paris.
- Siwananda, Sri Swami. 2003. *Inti Sari Ajaran Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Tim Penyusun. 2013. *Profil Kementerian Agama Kota Denpasar*. Denpasar: Kementerian Agama Kota Denpasar.
- Tim Penyusun. tt. *Ika Likita (Monografi Desa Pakraman Ubung)* Denpasar: Desa Pakraman Ubung.
- Tim Penyusun. 1999/2000. *Monografi Pura Subak Pakel*. Denpasar: Pura Subak Pakel
- Tim Penyusun. 2013. *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Tahun 2013*.
- Tim Penyusun. 2014. *Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa Pakraman Ubung Tahun 2013 dan 2014*.
- Wiana, I Ketut & Raka Santeri. 1993. *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-Abad*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Wiana, I Ketut. 1995. *Yajña dan Bhakti dari Sudut Pandang Agama Hindu*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.
- Wiana, I Ketut. 2006. *Menyayangi Alam Wujud Bhakti Pada Tuhan*, Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.

Daftar Bacaan

- Coleman, J.S., *Social Capital In Creation of Human Capital*, American Journal of Sociology, 94 Supplement: S95-120.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. 2007. *Pedoman Pemberdayaan Majid (Melalui Aspek Idarah, Imarah, dan Ri'ayah)*.
- Fukuyama F., 1995. *The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Newyork: Free Press.
- Halpen, David. 2005. *Social Capital*. Cambridge: Polity.
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama.
- PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Putnam, R.D., 1993. *Marking Democracy Work: Civil Tradition In Modern Italy*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Rais, Rahmat. 2009. *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Internet:
<http://sosiohistoryedi.blogspot.com/2012/03/asal-usul-wangsa-sailendra.html>

EPILOG

Oleh Imam Addaruqutni

Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Kebanggaan kita sebagai bangsa di antaranya adalah klaim kita sebagai bangsa sekaligus umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Namun, kekecewaan kita serta merta muncul manakala menimbang kondisi yang kontras antara menjamurnya rumah-rumah ibadah yang *nota bene* sebagai pusat-pusat spiritualitas religious serta menguatnya peran sub-kultur yang boleh dikata sebagai sangat otonom, ternyata belum maksimal dalam peran transformasi sosial termasuk transformasi politik yang—dibanding dengan Negara-negara industrial maju semisal Jepang, Korea, dan sebagainya—masih menyedihkan. Mengapa kondisi ini terjadi? Mengapa kita menjadi seperti bangsa yang mengalami keterbelahan kepribadian (*split personality*) dan sebagai bangsa yang ambigu dalam arti bangsa dan umat beragama dengan perbuatan nyata yang secara kualitatif dan kuantitatif dapat dikatakan sebagai melecehkan kebanggaan kebangsaan (*national pride*) dan kesucian agama (*religious sanctity*) anutan?

Jika praktik/tradisi kehidupan dalam rumah ibadah sanggup mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*) melalui pola yang akuntabel dan transparan misalnya sebagai tampak dalam laporan rutin/berkala berkenaan dengan penerimaan-pengeluaran keuangan/dana amal, maka mengapakah hal itu tiba-tiba gagal ketika memasuki arena publik (*public sphere*) dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata-kelola pemerintahan yang baik (*clean government and good governance*). Mengapa praktik korupsi begitu menggejala di sementara kalangan yang justru pemegang otoritas kebijakan dan tidak jarang dipuji sebagai di antara putra terbaik bangsa. Mentalitas yang mana dari manusia yang sama maka tiba-tiba menjadi pribadi yang asing dan lain dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegara-bangsaan?

Karena itu, sesuai dengan tradisi akuntabel dan transparan yang lazim berlangsung di berbagai rumah ibadah, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya itu semua merupakan sumbangan *social capital* yang mestinya sangat berarti terhadap kehidupan dalam spektrum masyarakat luas dan Negara (**Ronald Inglehart and Pippa Norris, *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World*, 2003**). Lebih-lebih dalam era ini di mana agenda transformasional kebangsaan kita mau tidak mau metinya mampu menapaki proses peralihan pola kehidupan bangsa kita dari strata

(kehidupan) agrarian ke strata (budaya) kehidupan (Negara) industrial dan bahkan strata *post-industrial* sebagaimana sejumlah Negara sekawasan telah berhasil menapakinya (Inglehart, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, 1997).

Akan halnya dengan peran pemberdayaan rumah ibadah juga sekaligus pemberdayaan sosial (*social empowerment*) yang diharapkan datang dari rumah ibadah itu sendiri, dengan mengingat peran strategisnya sebagai pusat masyarakat (*community center*) kiranya dengan tetap mengapresiasi eksistensinya sebagai “lembaga” *non-profit oriented* yang mengutamakan kesalehan sosial. Dengan demikian mengukur dengan pendekatan-pendekatan analisis profesional murni (*fully professional*) semisal *Total Quality Management* (TQM) sebagaimana hal itu lazim berlaku di dunia bisnis profesional yang diterapkan oleh penelitian dari buku yang sedang di tangan pembaca ini. Kehati-hatian dan kecermatan dalam mengaplikasikan pendekatan analisis ini juga dimaksudkan untuk menghindari anachronisme ilmiah (*scientific anachronism*) dan terjadinya deviasi dalam kesimpulannya. Akan tetapi, sejauh hal itu dimaksudkan sebagai perlunya peng gagasan pengelolaan rumah-rumah ibadah beserta program pemberdayaannya dalam bidang tertentu, khususnya program yang mengait agenda besar yaitu penyediaan semakin banyak jumlah tenaga terampil (*skilled-manpowers*) yang di angankan dapat diakomodasi oleh sistem selektif dalam masyarakat dan Negara, maka hal demikian perlu diapresiasi.

Karena itu, hemat saya, buku ini, dengan data kualitatif lapangan yang banyak serta pendekatan analisis TQM yang tidak lazim, dapat dikatakan cukup kreatif ditawarkan oleh para penelitiannya dan karena itu sangat penting untuk dibaca dan lebih-lebih dapat menjadi inspirasi bagi rintisan langkah penelitian lebih lanjut di masa depan bagi para peneliti di satu pihak dan para perancang program pemberdayaan rumah ibadah pada umumnya di lain pihak.

Saya yakin bahwa sumbangan ilmiah dari penelitian ini cukup signifikan dan semoga, karena itu, para khalayak pemangku kepentingan rumah-rumah ibadah secara keseluruhan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti telaahnya.

Ciputat, 20 Oktober 2015

Indeks

A

Agama, 1, 3, 4, 5, 10, 20, 22, 24, 55,
70, 74, 75, 96, 98, 120, 122, 124,
143, 153, 168, 169, 170, 185, 187,
188, 189, 190, 195, 200, 208, 212,
214, 215, 216, 217, 220, 223, 231,
232, 233, 241

Allah SWT, 2

Al-Qur'an, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38,
41, 43, 47, 48, 49, 50, 68, 82, 92

Aset, 28, 29, 33, 35, 55, 60, 69

B

Bali, 20, 23, 79, 185, 186, 191, 192,
194, 195, 199, 200, 202, 207,
209, 211, 212, 213, 215, 216

Banjar, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 87,
90, 92, 96, 187, 191, 192, 206, 217

Banjarmasin, 20, 73, 74, 75, 80, 81,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94

Batak, 11, 23, 97, 98, 99, 100,

114 Bhakti, 172, 211, 216, 220,

226 Bhiksu, 190

Buddha, 3, 4, 12, 19, 24, 74, 75, 98,
122, 160, 188, 189, 190, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 231, 232, 233, 235,
236, 239, 240

Buddha Gautama, 223

D

Dakwah, 25, 26, 28, 37, 53, 80, 91

Dana, 26, 41, 80, 89, 103, 108, 109,
110, 115, 118, 164, 167, 175, 176,
179, 194, 206, 208, 225, 227, 228

Dharma, 200, 216, 219, 228,

233 Diakona, 134

G

Gereja, 75, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 122, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 131, 133, 134, 135, 136,
139, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
150, 151, 153, 160, 161, 165, 166,
169, 170, 171, 174, 175, 176, 177,
179, 180, 183

Gereja Jetis, 160, 176, 180

Gereja Kumetiran, 169, 172, 175,
176, 177, 179, 180

GKI Immanuel Boswezen, 137,
138, 139, 147, 153

GKI Maranatha Remu, 128, 131, 132,
138, 139, 140, 141, 143, 144, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 153

H

Haji, 27, 28, 78

Hindu, 3, 4, 12, 19, 24, 74, 75, 79,

98, 122, 160, 168, 186, 188, 189,

190, 191, 195, 196, 197, 199, 200,
202, 204, 206, 213, 214, 216, 232
HKBP, 11, 19, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120
HKBP Cinta Damai, 100, 102,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 117, 119
HKBP Maranatha, 107, 111,
113, 114, 117, 119

I

Injil, 99, 122, 125, 126, 129, 130,
131, 134, 140, 141
Islam, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 19, 20, 22,
24, 25, 26, 36, 39, 40, 44, 45, 47,
48, 52, 65, 68, 71, 74, 75, 76, 77,
79, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 94, 96,
98, 122, 124, 153, 159, 160, 168,
188, 189, 190, 241

J

Jaringan, 40, 63
Jawa, 20, 23, 25, 26, 49, 74, 79, 98,
155, 159, 165, 177, 180, 197, 217,
221, 222, 229, 231, 233, 238
Jemaah, 82, 89, 91
Jemaat, 122, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 132, 134, 137, 138,
139, 140, 142, 143, 144, 146,
147, 150, 151, 153

K

Katolik, 3, 4, 11, 19, 24, 74, 98,
122, 159, 161, 166, 167, 168,
169, 174, 176, 177, 180, 181,
182, 183, 188, 189, 190
Kebaktian, 225
Klenteng, 75
Kristen, 3, 4, 11, 24, 75, 98, 99, 100,
103, 108, 114, 115, 120, 122, 124,
125, 126, 127, 131, 133, 135, 136,
138, 139, 142, 143, 150, 152, 159,
160, 188, 189

M

Masjid, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 122, 124, 243
Masjid Al Falah, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 49, 50, 51
Masjid Jami Sungai Jengah, 85,
89, 90, 91, 93, 94
Masjid Sultan Suriansyah, 75, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 94
Medan, 97, 98, 99, 100, 102, 103,
104, 105, 106, 111, 120
Modal sosial, 8, 9, 35, 119, 229, 239

Model, 4, 47, 60, 66, 75, 85, 93,
105, 111, 151, 169, 191, 196,
204, 209, 220, 222, 230

N

Networking, 23, 40

Norma, 43, 64

Norms, 23

P

Papua, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 132, 133, 134, 136, 138,
139, 141, 142, 150, 153

Paroki, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 171, 172, 174,
175, 176, 177, 179, 180, 181

Pastor, 160, 165, 167, 175,
180 Pastoral, 164, 175

Pelayanan, 30, 47, 66, 107, 126,
134, 225, 226, 239

Pemberdayaan, 4, 7, 10, 20, 22, 24,
45, 47, 66, 67, 71, 75, 88, 96, 120,
137, 148, 149, 153, 167, 169, 181,
191, 194, 196, 200, 204, 206, 209,
210, 213, 220, 222, 230, 241

Pendeta, 102, 103, 110, 120,
128, 138, 139, 143, 190

Pengelolaan, 28, 55, 56, 80, 85, 89,
99, 103, 105, 108, 110, 111, 119,
124, 164, 175, 180, 196, 209, 239

Puasa, 176, 177

Pura, 75, 122, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210,
212, 213, 214, 216

Pura Desa, 191, 192, 193, 195, 197,
198

Pura Puseh, 191, 192, 193

Pura Subak Pakel II, 204, 205, 206,
209, 212

Purnama, 197, 204

R

Resiprositas, 45, 65

Romo, 155, 162, 165, 166, 167,
168, 177, 222, 231

Rumah ibadat, 1, 10

S

Semarang, 158, 161, 163, 164, 167,
168, 174, 175, 180, 218, 219, 220,
222, 224, 225, 230, 231, 233

Strong Leadership, 97

Subak, 12, 192, 205, 207, 208,
210, 212, 216

Surabaya, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 49,
50, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 66,
67, 68, 70, 98, 158, 216

T

Tilem, 197

Total Quality Management, 13, 14,
16, 244

TQM, 13, 14, 15, 16, 19, 244

Tri Hita Karana, 185, 196, 214, 216

Tri Mandala, 185, 214

Tri Sandhya, 192

Trust, 23, 36, 39, 60

U

Ulama, 39, 96, 190
Umat, 10, 20, 108, 115, 137, 176,
181, 189, 192, 205, 217, 223, 240
Umroh, 28

V

Vihara, 75, 189, 217, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 239, 240
Vihara Maha Bodhi, 230, 231, 239
Vihara Tanah Putih, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 227, 228, 229, 230,
239

W

Wakaf, 33

Y

Yayasan, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33,
34, 36, 40, 41, 47, 49, 50, 125, 165,
171, 216, 220, 221, 222, 224, 226,
227, 230, 231, 232, 236, 239
Yesus Kristus, 126, 143, 175, 178

Z

Zakat, 27, 68